



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021

**Jalan Brigjend H. Hasan Basryi No. 037 Telepon/Fax 0517-31122
Rantau – Kalimantan Selatan**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Setwan melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKJIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2021. Akhirnya semoga LKJIP Tahun anggaran 2021 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD.

Rantau, Februari 2022

SEKRETARIS DPRD,



H.NOOR IFANSYAH,SKM,MS

Pembina Utama Muda

BAB

I

PENDAHULUAN

Terwujudnya *good governance* dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Proses penyalarsan dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dalam jangka menengah (5 tahunan), Rencana Kerja (RENJA) tahunan atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum pembentukan Sekretariat DPRD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas DPRD. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan terakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 implementasi Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin. Berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menjalankan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD;
 - c. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD dan;
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- Uraian tugas dimaksud diatas sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan, hukum dan persidangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan;
 - c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bagian hukum dan persidangan;
 - d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - e. Mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan dukungan penyelenggaraan bidang implementasi legalisasi;
 - g. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan

- kebijakan teknis bagian umum dan keuangan, hukum dan persidangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- h. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan, hukum dan persidangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :

- a. Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Hukum dan Persidangan;
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Bagian Umum Dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan serta program dan keuangan Sekretariat DPRD.

Uraian tugas Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis umum dan keuangan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tata usaha;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian dan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlengkapan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program;

- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan anggaran;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penatausahaan keuangan;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD dan menyediakan fasilitas Fraksi DPRD;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengatur tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- j. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- k. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- l. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD, kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Bagian Hukum Dan Persidangan

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kajian perundang-undangan dan hubungan masyarakat serta persidangan dan risalah.

Uraian tugas Bagian Hukum dan Persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis hukum dan persidangan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan

- mengendalikan penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
 - d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
 - e. Menyusun program, memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengumpulkan bahan penyiapan drafrancangan peraturan daerah inisiatif;
 - g. Menyusun program, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 - h. Menyusun program, memverifikasi, mengoordinasikan, menyusun, dan mengevaluasi risalah rapat;
 - i. Menyusun program dan mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - j. Menyusun program, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

c. Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi penganggaran dan fasilitasi pengawasan.

Uraian tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis fasilitasi penganggaran dan pengawasan;

- b. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi aspirasi masyarakat;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;

- j. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pelaksanaan penegakan Kode Etik DPRD;
- k. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- l. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- m. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- n. Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi persetujuan Kerjasama Daerah; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

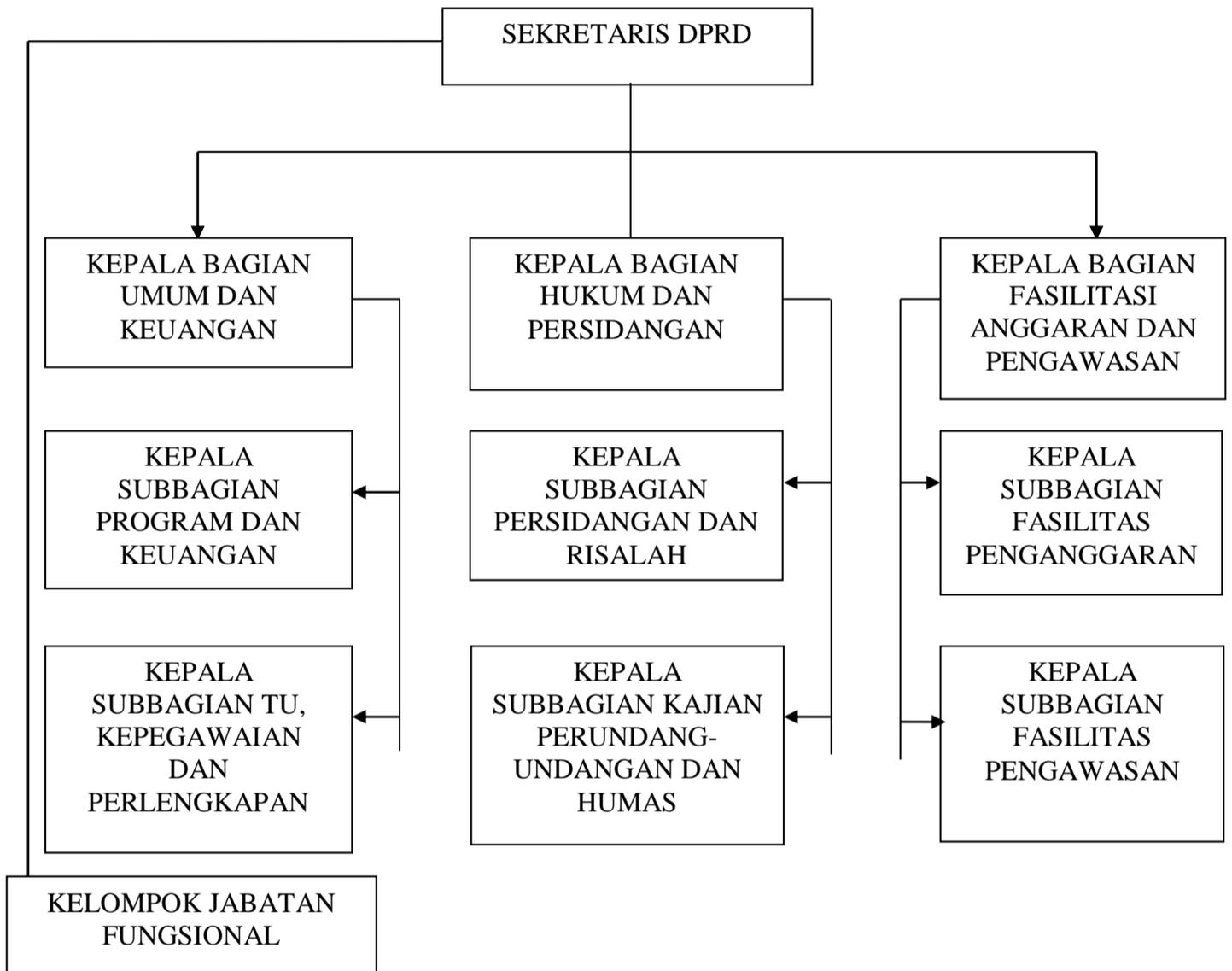
kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 berjumlah 25 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana tabel berikut ini :

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	MAGISTER (S-3)	0
2	MAGISTER (S-2)	1
3	SARJANA	16
4	DIPLOMA 4	1
5	DIPLOMA 3	2
6	DIPLOMA 2	0
7	DIPLOMA 1	0
8	SLTA	5
9	SLTP	0
10	SD	0
	JUMLAH	25

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KAB. TAPIN



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, target capaian kinerja Tahun 2021 dan aspek strategis daerah Tahun 2021 maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Aspek strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Beberapa hal dasar pertimbangan dalam pemilihan Aspek strategis di Kabupaten Tapin yaitu:

1. Merupakan tugas dan tanggungjawab Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin
2. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;

3. Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
4. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
5. Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah;
6. Janji politik yang harus diwujudkan.

Aspek strategis yang menjadi prioritas bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Fasilitasi Rapat-rapat DPRD Tepat Waktu;
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Guna Menunjang Pelaksanaan Kinerja;
3. Peningkatan Fasilitasi Reses Melalui Peningkatan Pokok-pokok Pikiran.

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menghadapi berbagai kendala dan hambatan ada beberapa isu strategis yang perlu di pertimbangkan dan disikapi secara arif dan bijaksana serta proaktif dengan melihat peluang dan kesempatan yang ada.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sebagian staf aparatur masih kurang dalam wawasan tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD;
2. Kualitas kemampuan, keterampilan/skill aparatur masih rendah;
3. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
4. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
5. Kurangnya personalia dan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta penataan administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah secara sinergis;
6. Masih belum optimalnya peran Sekretariat DPRD sebagai jembatan penghubung antara kemitraan yang harmonis antara Eksekutif-Legislatif.
7. Belum disusunnya SOP Sekretariat DPRD.

D. TINDAK LANJUT TERHADAP LHE TAHUN 2020

URAIAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP

NO	UNIT KERJA NOMOR LHE	TEMUAN	REKOMENDASI	KATEGORI TINDAK LANJUT		
				S	DP	B
1	2	3	4	5	6	7
	700/013 /LHE.AKIP /2021	<p>a. Perencanaan Kinerja</p> <p>1. Capaian/target kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan (reward)</p> <p>b. Pengukuran Kinerja</p> <p>1. IKU belum dijadikan dasar penilaian kinerja, pemberian reward dan punishment, promosi maupun penurunan jabatan</p> <p>2. SOP monitoring kinerja</p> <p>3. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment</p>	<p>1. Agar capaian/target kinerja dapat dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan (reward)</p> <p>1. Agar IKU dapat dijadikan dasar penilaian kinerja, pemberian reward dan punishment, promosi maupun penurunan jabatan</p> <p>2. Agar membuat SOP Monitoring Kinerja</p> <p>3. Agar hasil pengukuran kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment</p>	√		
				√		
				√		
				√		

Untuk laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten sudah melengkapi tindak lanjut yang direkomendasikan.

BAB

II**PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan yang jelas dan tepat, maka instansi pemerintah diharapkan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang kemungkinan akan timbul.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

1. TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, di mana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Sekretariat DPRD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
2. Meningkatkan Kualitas SDM ASN Sekretariat DPRD
3. Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD
4. Meningkatkan kualitas hasil monitoring dan evaluasi kerja
5. Meningkatkan dukungan terhadap kelembagaan DPRD

2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut:

1. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif
3. Meningkatnya Kualitas SDM ASN Set.DPRD
4. Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD
5. Tercatat, terlapor dan terbahasnya realisasi kinerja dan Administrasi Keuangan
6. Meningkatnya dukungan dalam peningkatan Kualitas SDM DPRD

Tujuan dan sasaran strategis serta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1	2	4	5
Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD	Terakomodirnyanya Pelayanan dan Fasilitasi Kegiatan Kegiatan Anggota DPRD	Meningkatnya pelayanan terhadap Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu
		Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir
		Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Target Kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi, selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui capaian kinerja. Capaian kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan, jika ditemukan ketidakberhasilan maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokus pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Uraian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD dan penjelasan/perhitungan IKU dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	TARGET	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB	CAPAIAN
Meningkatnya pelayanan terhadap Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	Nilai Rata-rata unsur pelayanan Tahun n X Nilai Penimbang (Nilai Penimbang adalah 25) (Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara no. Kep/25/M.PAN/2004)	80	Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Komplain Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Komplain}} \times 100\%$	100%	Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang di fasilitasi}}{\text{Jumlah permintaan tindak lanjut hasil kunjungan kerja DPRD}} \times 100\%$	100%	Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	

Bab II

	<p>Percentage Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu</p>	$\frac{\text{jumlah naskah akademik yang terfasilitasi diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Naskah Akademik Yang Direncanakan}} \times 100$	80%	Bagian Hukum dan Persidangan	
	<p>Percentage risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Risalah Rapat Dewan Yang Terselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Risalah Rapat Yang Harus Dibuat}} \times 100\%$	90%	Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan	
<p>Terakomodirnya Aspirasi masyarakat</p>	<p>Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir</p>	$\frac{\text{Jumlah Aspirasi Yang Terakomodir}}{\text{Jumlah Aspirasi Yang Masuk}} \times 100$	65%	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
<p>Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD</p>	<p>Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD</p>	$\frac{\text{Jumlah pokok pikiran DPRD Yang dinyatakan Selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Pokok pikiran yang masuk}} \times 100\%$	100%	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

C. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, berikut ikhtisar perjanjian kinerja berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2021 :

Bab II

IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

SKPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TAHUN : 2021

NO.	ESELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
Eselon II	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD	Aspirasi masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80%	108%
			Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%
			Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%
			Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	78.1%
			Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	111%
			Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	113%
			Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%
			Persentase Aparatur sesuai kompetensinya	80%	80%
			Persentase Kegiatan Dewan yang Tertifasilitasi dalam meningkatkan dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80%	80%
			Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80%	100%
Eselon III	Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80%	80%
			Meningkatkan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80%	100%
			Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	80%	80%

Bab II

Eselon III	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Persentase Kegiatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat yang terselesaikan Tepat Waktu	80%	80%
	Meningkatkan Keterediaan dan Fasilitas Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda	Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi	80%	78%
Eselon III	Meningkatkan partisipasi Anggota DPRD	Presentase rapat-rapat dewan yang memenuhi korum	80%	80%
	Meningkatkan Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80%	80%
	Tersedianya kegiatan reses Anggota DPRD	Jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 Kali	3 Kali
	Meningkatkan partisipasi Anggota DPRD	Presentase rapat-rapat Anggaran dan Pengawasan dewan yang memenuhi korum	80%	80%
Eselon IV	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya data dan administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan
		Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
Eselon IV	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan administrasi keuangan, semesteran, Akhir tahun dan lain-lain yang tersedia	100%	100%
		Tersedianya Penyusunan Program Kerja DPRD	12 Bulan	12 Bulan
Eselon IV	Tersedianya Fasilitas Rapat dan Persidangan sesuai jadwal	Pelayanan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan
		Tersedianya Kegiatan Rapat Dengar Pendapat	12 Bulan	12 Bulan
Eselon IV	Tersedianya Informasi Kegiatan DPRD	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Paket	1 Paket

Bab II

			Terlaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Paket	1 Paket
Eselon IV	Terlaksananya kegiatan fasilitasi Rapat-rapat Penganggaran DPRD dan pertanggung jawaban DPRD	Terfasilitasinya rapat-rapat pembahasan anggaran dan pertanggung jawaban APBD	1 Paket	1 Paket	
Eselon IV	Terlaksananya Kegiatan pengawasan yang terlaksana	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	
		Membandingkan dan menyelaraskan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan RPJMD	100%	65.60%	

BAB

**AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin tahun 2021 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil,

- b. 70 % - < 85 % : Berhasil,
- c. 55 % - < 70 % : Cukup Berhasil,
- d. < 55 % : Tidak Berhasil.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021.

Dalam rangka mengukur kinerja serta untuk lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)* yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yakni :

1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2021

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis. Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis ditetapkan dengan beberapa Indikator Kinerja Utama, rata-rata Capaian IKU pada Tahun 2021 adalah **100%**.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Kegiatan Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	87,14	108 %

- Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Anggota DPRD

Adapun Formula rumusan pengukuran Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD berdasarkan keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no.Kep/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yaitu Nilai Rata-Rata Unsur Tertimbang X Nilai Penimbang (dengan Nilai Penimbang sudah ditetapkan=25).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survey Indeks kepuasan Masyarakat kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai respondendengan metode Penyebaran angket Quisioner.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus $\text{Bobot nilai rata-rata Jumlah bobot } 1 = \text{tertimbang Jumlah Unsur} = 9 = 0,111$ “

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur IKM = Total unsur yang terisi X Nilai penimbang dengan nilai dasar 25, dengan rumus $\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Tahun 2021 dapat ditelusuri pada tabel tabel berikut :

SNilai /Unsur	87	82	82	93	85	84	85	89	98
NRR / Unsur	3.480	3.280	3.280	3.720	3.400	3.360	3.400	3.560	3.920
NRR tertbg/ unsur	0.386	0.364	0.364	0.413	0.377	0.373	0.377	0.395	0.435
								*)	**)
IKM Unit pelayanan								3.485	87.135

IKM UNIT PELAYANAN : 87,14**Mutu Pelayanan : Baik****Keterangan :**

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata = Indeks Kepuasan Masyarakat
- IKM = Jumlah NRR IKM tertimbang
- *) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- **) = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR Per Unsur = NRR per unsur x 0,111

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3.480
U2	Prosedur Pelayanan	3.280
U3	Kecepatan Pelayanan	3.280
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3.720
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.400
U6	Kompetensi Petugas	3.360
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.400
U8	Penanganan Pengaduan	3.560
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.920

Dari Tabel diatas dapat di uraikan bahwa Berdasarkan hasil Kuisisioner Indeks Kepuasan Pelayanan kepada 25 orang Responden dalam hal ini Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin dapat diperoleh Capaian 87,14 atau 108% dari Target 80.

Kualitas Peningkatan Pelayanan dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin sesuai sasaran indeks Kepuasan dinilai dari 9 unsur Pelayanan yang termuat dalam quisioner/ angket indeks Kepuasan Masyarakat yang diberikan kepada para responden yaitu Pimpinan dan anggota DPRD berjumlah 25 orang. 9 unsur yang dirumuskan pada kuisisioner yaitu kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian/kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas pelayanan, penanganan pengaduan, kualitas sarana dan prasarana. Adapun aspek pelayanan yang dinilai dari ke-9 unsur tersebut adalah:

1. Pelayanan Kesekretariatan pada umumnya
2. Pelayanan Peningkatan Kapasitas/SDM Pimpinan dan Anggota
3. Pelayanan Fasilitasi Rapat
4. Pelayanan Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Makanan dan Minuman
6. Pelayanan Kehumasan dan Protokol
7. Pelayanan Kegiatan Reses

Kenaikan nilai indeks itu dapat dilihat dari naiknya penilaian pada Beberapa unsur dengan rincian sebagai berikut :

- Unsur 1 (Kesesuaian Persyaratan)

Dari 25 responden pada tahun 2021 11 orang memberikan nilai baik dan 14 orang menyatakan sangat baik.

- Unsur 2 (Prosedur Pelayanan)

Dari 25 responden pada tahun 2021 18 orang memberikan nilai sesuai dan 7 orang menyatakan sangat baik.

- Unsur 3 (Kecepatan Pelayanan)

Dari 25 responden pada tahun 2021 18 orang memberikan nilai sesuai dan 7 orang menyatakan sangat baik.

- Unsur 4 (Kesesuaian/Kewajaran Biaya)

Dari 25 responden pada tahun 2021 7 orang memberikan nilai baik dan 18 orang menyatakan sangat baik.

- Unsur 5 (Kesesuaian Pelayanan)

Dari 25 responden pada tahun 2021 15 orang memberikan nilai baik dan 10 orang menyatakan sangat baik.

- Unsur 6 (Kompetensi Petugas)

Dari 25 responden pada tahun 2021 16 orang memberikan nilai baik dan 9 orang menyatakan sangat baik.

- Unsur 7 (Perilaku Petugas Pelayanan)

Dari 25 responden pada tahun 2021 7 orang memberikan nilai baik dan 18 orang menyatakan sangat baik.

- Unsur 8 (Penangan Pengaduan)

Dari 25 responden pada tahun 2021 9 orang memberikan nilai baik dan 14 orang menyatakan sangat baik.

- Unsur 9 (Kualiatas sarana & Prasarana)

Dari 25 responden pada tahun 2021 2 orang memberikan nilai baik dan 23 orang menyatakan sangat baik.

Untuk indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Anggota DPRD Adapun program & kegiatan yang menunjang indikator tersebut adalah sbb:

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)
-----------------------------------	-------------------	----------------

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	30,226,394,109
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,645,120,409
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1,577,428,900
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Kantor DPRD	1,067,691,509
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202,100,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	202,100,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342,553,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	175,885,700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	166,667,300
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14,561,292,700
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14,201,657,200
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	284,635,500
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75,000,000
Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	12,475,328,000

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9,866,855,000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2,608,473,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase Komplain anggota dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100 %

- Persentase Komplain anggota dewan yang dapat diselesaikan

Keluhan atau komplain pelayanan adalah ekspresi perasaan ketidakpuasan atas standar pelayanan, tindakan atau tiadanya tindakan Sekretariat DPRD yang berpengaruh terhadap kegiatan anggota DPRD.

Indikator kinerja ini bertujuan sebagai alat kendali dan evaluasi terhadap pemberian kualitas pelayanan, meminimalkan kekecewaan pihak yang diberikan fasilitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan pihak yang difasilitasi, dalam hal ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Tapin. Obyek komplain dapat berupa keluhan terhadap layanan administrasi, layanan kegiatan DPRD, kesiapan, kebersihan dan kelayakan sarana dan prasarana.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin selama tahun 2021 menerima semua keluhan anggota DPRD terhadap pelayanan kesekretariatan dan merangkumnya dalam daftar Komplain dari anggota DPRD. Adapun tindak lanjut upaya Sekretariat DPRD adalah dengan melakukan penyelesaian terhadap obyek komplain anggota DPRD. Penyelesaian adalah Tindakan langsung perbaikan, evaluasi, dan rencana perbaikan yang hasilnya disampaikan kepada anggota DPRD, baik secara langsung maupun dalam rapat koordinasi internal.

Daftar Komplain Anggota DPRD Kabupaten Tapin terhadap Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Jenis Obyek Komplain	Uraian Komplain	Sumber Data
1	Prasarana	1. Kebersihan Toilet, Toilet yang kotor	Rapat Internal (10)
		2. Kebersihan ruangan, ruangan masih terlihat kotor	Rapat internal (3)
		3. Kebersihan Lantai Karpet, karpet berdebu dan kotor	Rapat internal (5)
		4. Kondisi Pagar kusam, pintu pagar susah dibuka	Pernyataan Langsung (3)
		5. Pembiaran lampu yang padam	Pernyataan langsung (1)
		6. Air tidak mengalir, Air di Penampungan sempat habis	Rapat Internal (5), Pernyataan langsung (7)
2	Sarana	7. Kebersihan Mobil Operasional kurang	Pernyataan Langsung (2)
		8. Kebersihan alat makan : piring, cangkir, gelas, sendok dan garpu	Pernyataan langsung (5)
		9. Kondisi kursi rapat yang banyak sudah tidak layak lagi	Pernyataan Langsung (2)
		10. AC yang kurang dingin	Pernyataan Langsung (3)
		11. Saluran TV yang kurang baik	Pernyataan Langsung (2)
		12. Konektivitas WiFi yang tidak maksimal	Pernyataan Langsung (3)
3	Layanan Pendampingan	13. Pendamping kurang komunikatif	Pernyataan Langsung (5)
		14. Pendamping dianggap kurang cekatan	Pernyataan Langsung (5)
4	Layanan Rapat	15. Kebersihan Meja, meja rapat berdebu	Pernyataan Langsung (5)
		16. Tampilan proyektor yang sudah buram	Pernyataan Langsung (1)
		17. Speaker meja yang tidak berfungsi	Pernyataan Langsung (1)
		18. Habisnya tisu pada meja rapat	Pernyataan Langsung (4)
		19. Menu Komsumsi yang tidak bervariasi	Pernyataan Langsung (6)
5	Layanan Administrasi	20. Keterlambatan penyelesaian SPJ yang berhubungan dengan kegiatan DPRD	Pernyataan Langsung (5)
		JUMLAH KOMPLAIN	86

Sumber data Bagian Umum dan Keuangan

Tindak Lanjut Penyelesaian Komplain Anggota DPRD Kabupaten Tapin dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Jenis Obyek Komplain	Uraian Komplain	Penyelesaian Komplain
1	Prasarana	Kebersihan Toilet, Toilet yang kotor	1. Melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan kebersihan meliputi kebersihan toilet, lantai, dan karpet 2. Menyampaikan bahwa untuk semua kegiatan kebersihan dalam gedung pada tahun 2022 akan dipercayakan kepada jasa pihak ketiga kebersihan
		Kebersihan ruangan, ruangan masih terlihat kotor	
		Kebersihan Lantai Karpet, karpet berdebu dan kotor	
		Kondisi Pagar kusam, pintu pagar susah dibuka	1. Menyampaikan bahwa pada tahun 2021 dilaksanakan renovasi pagar 2. Menyampaikan hasil dari renovasi pagar telah menyelesaikan semua keluhan tentang pagar
		Pembiaran lampu yang padam	1. Langsung melakukan kegiatan penggantian lampu yang padam
Air tidak mengalir, Air di Penampungan sempat habis	1. Langsung melaksanakan perbaikan terhadap mesin pompa air 2. Melaksanakan perbaikan jalur pipa air 3. Melaporkan hasil perbaikan tersebut dalam rapat internal		
2	Sarana	Kebersihan Mobil Operasional kurang	1. Langsung melaksanakan pencucian mobil operasional
		Kebersihan alat makan minum : piring, cangkir, gelas, sendok dan garpu	1. Melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pencucian alat makan minum 2. Menyampaikan bahwa untuk semua kegiatan pencucian alat makan minum pada tahun 2022 akan dipercayakan kepada jasa pihak ketiga kebersihan (pramusaji)
		Kondisi kursi rapat yang banyak sudah tidak layak lagi	1. Menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2022 akan dilaksanakan penggantian proyektor, karena proyektor yang ada sudah sangat lama
		AC yang kurang dingin	1. Langsung melaksanakan servis AC 2. Melakukan pergantian dengan AC yang baru sesuai anggaran tahun 2021

		Saluran TV yang kurang baik	<ol style="list-style-type: none"> Langsung melakukan perbaikan saluran kabel TV Menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2022 akan dilaksanakan pemasangan saluran TV Mandiri (CATV)
		Konektivitas WiFi yang tidak maksimal	<ol style="list-style-type: none"> Memasang penguat sinyal WiFi Menyampaikan pada tahun 2022 akan dilaksanakan penambahan kapasitas WiFi
3	Layanan Pendampingan	Pendamping kurang komunikatif Pendamping dianggap kurang cekatan	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun pendampingan dengan memperhatikan kapasitas kompetensi Menekankan penerapan SOP pendampingan
4	Layanan Rapat	Kebersihan Meja, meja rapat berdebu	<ol style="list-style-type: none"> Langsung melakukan kebersihan meja Menyampaikan bahwa untuk semua kegiatan kebersihan dalam Gedung pada tahun 2022 akan dipercayakan kepada jasa pihak ketiga kebersihan
		Tampilan proyektor yang sudah buram	1. Menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2022 akan dilaksanakan penggantian proyektor, karena proyektor yang ada sudah sangat lama
		Speaker meja yang tidak berfungsi	1. Langsung melakukan perbaikan speaker dan konektivitasnya saat itu juga
		Habisnya tisu pada meja rapat	1. Langsung mengadakan tisu di meja rapat saat itu juga
		Menu Komsumsi yang tidak bervariasi	<ol style="list-style-type: none"> Mengkomunikasikan menu komsumsi dengan pihak anggota DPRD Melakukan pemesanan menu sesuai hasil komunikasi dengan anggota DPRD
5	Layanan Administrasi	Keterlambatan penyelesaian SPJ yang berhubungan dengan kegiatan DPRD	1. Menekankan penerapan SOP penyelesaian SPJ kepada setiap penanggung jawab penyelesaian SPJ

Sumber data Bagian Umum dan Keuangan

Dari daftar komplain dapat digambarkan jumlah total keseluruhan komplain adalah 86 yang terbagi ke dalam 5 kategori layanan yang terdapat komplain. Secara lingkup permasalahan sejumlah 86 komplain tersebut menyatakan ketidakpuasan atas 20 permasalahan.

Uraian Komplain	Jumlah Komplain	Komplain yang dapat diselesaikan	Keterangan
1. Kebersihan Toilet, Toilet yang kotor	10	10	Sebagian besar penyelesaian direncanakan tahun 2022
2. Kebersihan ruangan, ruangan masih terlihat kotor	3	3	Sebagian besar penyelesaian direncanakan tahun 2022
3. Kebersihan Lantai Karpet, karpet berdebu dan kotor	5	5	Sebagian besar penyelesaian direncanakan tahun 2022
4. Kondisi Pagar kusam, pintu pagar susah dibuka	3	3	
5. Pembiaran lampu yang padam	1	1	
6. Air tidak mengalir, Air di Penampungan sempat habis	12	12	
7. Kebersihan Mobil Operasional kurang	2	2	
8. Kebersihan alat makan : piring, cangkir, gelas, sendok dan garpu	5	5	Sebagian besar penyelesaian direncanakan tahun 2022
9. Kondisi kursi rapat yang banyak sudah tidak layak lagi	5	5	Sebagian besar penyelesaian direncanakan tahun 2022
10. AC yang kurang dingin	3	3	
11. Saluran TV yang kurang baik	2	2	
12. Konektivitas WiFi yang tidak maksimal	3	3	
13. Pendamping kurang komunikatif	5	5	
14. Pendamping dianggap kurang cekatan	5	5	
15. Kebersihan Meja, meja rapat berdebu	5	5	
16. Tampilan proyektor yang sudah buram	1	0	
17. Speaker meja yang tidak berfungsi	1	1	
18. Habisnya tisu pada meja rapat	4	4	
19. Menu Komsumsi yang tidak bervariasi	6	6	
20. Keterlambatan penyelesaian SPJ yang berhubungan dengan kegiatan DPRD	5	5	
JUMLAH	86	86	

Sumber Bagian Umum dan Keuangan

$$\text{Persentase komplain anggota DPRD yang dapat diselesaikan} = \frac{\text{Jumlah Komplain yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Komplain}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase komplain anggota DPRD yang dapat diselesaikan} = \frac{86}{86} \times 100\%$$

$$\text{Persentase komplain anggota DPRD yang dapat diselesaikan} = 100\%$$

Sehingga untuk capaian kinerja didapat dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian untuk indikator kinerja Presentase komplain anggota dewan yang dapat terselesaikan ditahun 2021 adalah 82,56%

Untuk indikator Persentase Komplain anggota dewan yang dapat diselesaikan, Adapun program dan kegiatan yang menunjang untuk indikator tersebut adalah sbb:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	30,226,394,109
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,645,120,409
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1,577,428,900
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Kantor DPRD	1,067,691,509
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202,100,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	202,100,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342,553,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	175,885,700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	166,667,300
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14,561,292,700
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14,201,657,200
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	284,635,500
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75,000,000
Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	12,475,328,000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9,866,855,000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2,608,473,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%	100 %

- Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD

Berdasarkan data hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tapin tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Tapin selama tahun 2021, berdasarkan maksud dan tujuan kunjungan maka kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tapin berjumlah 281 Kunjungan Kerja.

No.	Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja
1	Komisi I	67
2	Komisi II	66
3	Komisi III	66
4	AKD/Gabungan/Pansus	12
5	Pimpinan DPRD	70

Sumber data Bagian Umum dan Keuangan

Dari hasil kunjungan tersebut terdapat kunjungan yang harus ditindaklanjuti sehubungan dengan kunjungan tersebut terkait dengan perumusan suatu kebijakan publik, kunjungan terkait dengan perbaikan pelayanan Pemerintah Daerah, kunjungan terkait dengan pemberlakuan peraturan baru, dan kunjungan yang terkait dengan usulan program pembangunan.

Tindak lanjut tersebut dapat berupa rapat dengar pendapat, rapat pembahasan rancangan peraturan daerah, rapat pembahasan program pembangunan, kegiatan pengawasan dan evaluasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dalam hal ini melakukan tugas memfasilitasi semua kegiatan tindak lanjut tersebut.

Dalam hal ini Sekretariat DPRD hanya memfasilitasi dan mempersiapkan Permintaan Tindak Lanjut dari hasil kunjungan mereka berupa Rapat Dengar Pendapat, audiensi dll. Dan tidak semua Kunjungan Kerja tersebut mereka tindak lanjuti.

Sumber data dari permintaan tindak lanjut hasil kunjungan ini maupun kegiatan fasilitasi tindak lanjutnya dapat dilihat dari Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Tapin selama tahun 2021 yang merupakan hasil pembahasan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tapin.

TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI I

No	Kunjungan Kerja	Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja
1	Jumat, 05 Maret 2021, ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tentang Layanan Pembuatan Identitas	Rabu, 02 Juni 2021, RDP dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tentang Layanan Pembuatan Identitas di Kabupaten Tapin
2	Rabu, 17 Maret 2021, ke Dinas Sosial Kota Banjarmasin tentang bantuan yang diberikan kepada pakir miskin	Rabu, 02 Juni 2021, RDP dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapin tentang bantuan yang di terima Pakir Miskin
3	Jumat, 28 Mei 2021, ke Dinas PMD Kabupaten Banjar tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak	Rabu, 02 Juni 2021, RDP dengan Dinas PMD Kabupaten Tapin tentang Pemilihan Kepala Desa serentak
4	Rabu, 10 Pebruari 2021, ke Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tentang Reformasi Pelayanan dan Penempatan Pencari kerja	Kamis, 17 Juni 2021, RDP dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapin tentang

		Ketersedian Lapangan Kerja untuk warga lokal di tengah Pandemi Covid 19
5	Senin, 22 Pebruari 2021, ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin tentang Anak yang bermasalah dengan hukum	Kamis, 17 Juni 2021, RDP, Dinas P3A Kabupaten Tapin tentang anak yang bermasalah dengan Hukum
6	Kamis, 20 Mei 2021, ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan	
7	Senin, 29 Maret 2021, Ke Dinas Satpol PP Kab. Banjar tentang Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan ke Tertiban Umum dan Masyarakat	Kamis, 17 Juni 2021, RDP dengan Dinas Satpol PP Kabupaten Tapin tentang penegakan Perda yang berhubungan dengan PKL
8	Jumat, 07 Mei 2021, ke Satpol PP Kota Banjarbaru tentang Penegakan Perda yang berhubungan dengan pedagang kaki lima (PKL)	
9	Jumat, 23 April 2021, ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar tentang Penyimpanan Surat-surat atau Documen yang berharga	Kamis, 17 Juni 2021, RDP dengan Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan Kabupaten Tapin tentang Penyimpanan Dokumen yang berharga
10	Senin, 10 Mei 2021, ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Banjarbaru tentang arsip yang boleh dimusnahkan sesuai dengan jangka waktu menurut peraturan	
11	Selasa, 16 Pebruari 2021, ke Dinas PMD Kota Banjarmasin tentang Pelaporan di Bidang Kerjasama Desa dan Pembinaan Keuangan Desa	Kamis, 15 Juli 2021, RDP dengan Dinas PMD Kabupaten Tapin dan para Camat se-Kabupaten Tapin tentang Anggaran Dana Desa dan Anggaran Dana Desa
12	Kamis, 03 Juni 2021, ke Dinas PMD Kabupaten Barito Timur tentang Pengawasan dan pembinaan anggaran dana desa	
13	Jumat, 18 Juni 2021, ke Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut tentang Penggunaan Dana Desa	
14	Kamis, 24 Juni 2021, ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Banjar tentang Layanan Pembuatan Surat Pindah Datang Penduduk	Kamis, 15 Juli 2021, RDP dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, dan, seluruh Camat se-Kabupaten Tapin tentang Pemutahiran Data Penduduk
15	Jumat, 25 Juni 2021, ke Dinas Sosial Kota Banjarbaru tentang Bantuan Sosial yang diberikan kepada Masyarakat	Kamis, 15 Juli 2021, RDP dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapin tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT)

16	Rabu, 03 Februari 2021 ke BPBD Kota Banjarmasin tentang Penanganan Bencana Banjir di masa pandemi Covid 19	Rabu 01 Des 2021, RDP dengan BPBD, Dinas Sosial dan Bapara Kabupaten Tapin tentang Sinkronisasi Pelayanan Penanggulangan Bencana,
17	Kamis, 04 Februari 2021 Ke Dinas Sosial Kota Banjarmasin tentang bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak banjir di masa pandemi Covid 19	
18	Senin, 15 Maret 2021, ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin tentang menghadapi musim panas	
19	Jumat, 16 April 2021, ke BPBD Kabupaten Banjar tentang penanganan darurat terhadap bencana yang terjadi	
20	Selasa, 04 Mei 2021, ke Dinas Sosial Kabupaten Banjar tentang bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak banjir	

Sumber data Bagian Umum dan Keuangan

TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA KOMISI II

No	Kunjungan Kerja	Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja
21	Jumat, 05 Maret 2021, ke Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tentang MBS dan EDS pada SMPN 1 Banjarmasin	Kamis, 17 Juni 2021, RDP dengan BKAD, Inspektorat, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dan Perwakilan Kepala Sekolah, tentang Tunjangan dan atau Insentif Tenaga Pengajar pada masa Pandemi Covid-19,
22	Kamis, 08 Juli 2021, ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tentang Sosialisasi dan Penganggaran Kebijakan Penerapan Protokol Kesehatan Pada Kegiatan Reguler Resmi, Komisi II	Selasa, 10 Agustus 2021, RDP dengan Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tentang Sarana dan Prasarana, Insentif dan Tunjangan serta Pelayanan di Bidang Kesehatan (Puskesmas) dan Bidang Pendidikan (Pendidikan Dasar) serta sarana dan prasarana

Sumber data Bagian Umum dan Keuangan

TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA KOMISI III

No	Kunjungan Kerja	Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja
23	Kamis, 04 Pebruari 2021, ke Balai Besar Jalan Kementerian PUPR tentang Lanjutan Penyelesaian Jalan Margasari – Marabahan	Rabu, 03 Maret 2021, RDP dengan Dinas PUPR Kabupaten Tapin, Camat CLU & CLS, Kades Sei Putting, Kade Kaladan

24	Selasa, 23 Maret 2021, ke Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan tentang Peningkatan Status Jalan Pandahan – Marabahan	dan Kades Beringin B, tentang Lanjutan Peningkatan Jalan Margasari – Marabahan,
25	Senin, 15 Maret 2021, ke DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup	Rabu, 17 Maret 2021, RDP dengan Dinas Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Tindakan Pencemaran Lingkungan, Kamis 25 Nov 2021, RDP dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin tentang Pengaduan Masyarakat dan Sosialisasi terhadap Pencemaran Lingkungan
26	Kamis, 04 Pebruari 2021, ke PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin tentang Status PDAM dan Proses Penyertaan Modal	Senin , 07 Juni 2021, RDP dengan PDAM Kabupaten Tapin tentang status PDAM
27	Selasa, 09 Maret 2021, ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Sampah Pasca Banjir, Komisi III	Kamis , 10 Juni 2021, RDP dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin tentang persampahan
28	Jumat, 09 April 2021, ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan TPA dan tinjau Lapangan Ke TPA Kabupaten Banjar	
29	Jumat, 07 Mei 2021, ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Limbah Sampah	
30	Jumat, 26 Maret 2021, ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Parkir	Senin, 14 Juni 2021, RDP dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin tentang Perparkiran dan lainnya
31	Senin, 10 Mei 2021, ke Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru masalah regulasi parkir dan arus mudik menghadapi Hari Raya	
32	Kamis, 21 Oktober 2021 ke Bagian Perlengkapan Setda Kota Banjarbaru tentang Pengelolaan Aset	Kamis, 05 Agust 2021, RDP dengan BKAD, Dinas Perhubungan, Bagian Perlengkapan Setda, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tapin, Camat Tapin Utara, Lurah Rangda Malingkung tentang Aset Daerah
33	Jumat, 22 Oktober 2021 ke DPRD Kota Banjarbaru tentang Pengawasan Aset Daerah	
34	Senin, 22 Pebruari 2021 ke Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong tentang Intensifikasi Peningkatan PAD Bidang Uji Kendaraan/KIR dan Pelabuhan	Kamis 04 Nop 2021, RDP dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin tentang Rencana Pembangunan Gedung KIR dan Penataan Parkir
35	Senin, 19 April 2021, ke Dinas PUPR Kabupaten HSU tentang Proses Perencanaan dan Usulan DAK Infrastruktur Jalan dan Sungai.	Senin 22 Nov 2021, RDP dengan Dinas PUPR Kabupaten Tapin tentang Inovasi Penataan Kebersihan Sungai dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

36	Jumat, 25 Juni 2021, ke Balai Sungai Wilayah Kalimantan III Kementerian PUPR tentang Normalisasi Saluran Irigasi di Kabupaten Tapin	
37	Selasa, 29 Juni 2021, ke Dinas Lingkungan Hidup tentang Konsisten Lindungi dan Kelola Lingkungan Hidup	
38	Jumat, 01 Oktober 2021, ke Dinas PUPR Kota Banjarmasin tentang Penataan Sungai di Kota Banjarmasin	
39	Selasa, 15 Juni 2021 ke Dinas Perhubungan Masalah Perda Tentang Perparkiran Penempatan dan Penataan Rambu Jalan dan Peralatan KIR	Kamis 09 Des 2021, RDP dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perkimtan, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin tentang Pembebasan Tanah untuk Pembuatan Gedung KIR

Sumber data Bagian Umum dan Keuangan

TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA BAPEMPERDA

No	Kunjungan Kerja	Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja
40	Senin, 28 Juni 2021, ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel tentang Inventarisasi Perda Kabupaeten/Kota di Biro Hukum Propinsi Kalimantan Selatan (Undangan)	Kamis, 12 Agustus 2021, Rapat Pembahasan Bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bag Hukum Setda Kab. Tapin, Bagian Hukum Set. DPRD Kab. Tapin, dan SKPD Terkait tentang Ranperda Di Luar Propemperda Tahun 2021; Ranperda Perubahan Perda Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023; Ranperda Perubahan Perda Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Tapin 2014-2034; Ranperda RDTR Kawasan Strategis Waduk Tapin; dan Ranperda RIPK Kabupaten Tapin
41	Senin, 28 Juni 2021, ke DPRD Kota Banjarbaru tentang Sinkronisasi terhadap Raperda Inisiatif dan Usulan Pemerintah Daerah	Senin, 20 September 2021, Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bag Hukum Setda Kab. Tapin, Bagian Hukum Set. DPRD Kab. Tapin, dan SKPD Terkait tentang Ranperda Yang Belum Masuk Pembicaraan Tingkat I, yaitu terhadap : Ranperda pada Propemperda, dan Ranperda di luar Propemperda
42	Selasa, 21 September 2021, ke Biro Perekonomian Setda. Prov. Kalsel tentang Status Badan Hukum PDAM Kab. Tapin	Kamis, 28 Oktober 2021, Rapat Pembahasan dengan Pansus, Bagian Hukum Setda, Bagian Ekobang Setda,

		Bagian Pemerintahan Setda, dan Bagian Hukum Set. DPRD Kabupaten Tapin tentang Ranperda Tentang Perubahan Badan hukum Perusahaan Air Minum Kabupaten Tapin menjadi Perusahaan Umum Daerah / Perseroan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin
--	--	---

Sumber data Bagian Umum dan Keuangan

Dari data tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari Hasil Kunjungan Kerja DPRD hanya 42 item yang ditindak lanjuti. Sehingga Sekretariat DPRD selaku memberikan fungsi pelayanan memfasilitasi 42 permintaan tindak lanjut tersebut ke dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat dan audiensi.

Indikator Kinerja Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%. Persentase tersebut didapat dari rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang di fasilitasi}}{\text{Jumlah permintaan tindak lanjut hasil kunjungan kerja DPRD}} \times 100\%$$

$$\frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga untuk capaian Kinerjanya didapat dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian indikator Kinerja Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD tahun 2021 adalah sebesar 100%.

Untuk indikator Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD, Adapun program dan kegiatan yang menunjang indikator tersebut adalah sbb:

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	12,475,328,000
Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	12,475,328,000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9,866,855,000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2,608,473,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	62,5%	78,1%

- Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu

Pada rancangan awal tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin mengalokasikan 10 naskah akademik ranperda yang akan dibahas, akan tetapi karena adanya kekurangan anggaran pada Kegiatan Penyusunan Program Kerja maka anggaran untuk Naskah Akademik Ranperda dikurangi menjadi 8. Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tapin direncanakan pembuatan 8 buah Naskah Akademik Ranperda Inisiatif dan berhasil terealisasi 5 buah Naskah Akademik Ranperda saja.

Adapun Naskah Akademik Ranperda Inisiatif yang dibuat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Nama Ranperda	Keterangan
1	Naskah Akademik Ranperda tentang pengelolaan sungai	Raperda Inisiatif DPRD
2	Naskah Akademik Ranperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Raperda Inisiatif DPRD
3	Naskah Akademik Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Tapin	Raperda Inisiatif DPRD
4	Appraisal Tunjangan Transportasi	Appraisal
5	Appraisal Tunjangan Perumahan	Appraisal

Sumber data: Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin

Indikator Kinerja Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 62,5% dari target 80% dengan capaian kinerja 78,1% Persentase tersebut didapatkan dari rumus berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perda yang terfasilitasi terselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah fasilitasi yang direncanakan}} \times 100 \%$$

$$\frac{5}{8} \times 100\% = 62,5\%$$

Sehingga untuk capaian Kinerjanya didapat dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{62,5}{80} \times 100\% = 78,1\%$$

Sehingga capaian untuk indikator kinerja Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu ditahun 2021 adalah 78,1%

Untuk indikator Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu, Adapun program dan kegiatan yang menunjang indikator tersebut adalah sbb:

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	555,459,600
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	555,459,600
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	21,625,700
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	319,999,800
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	213,634,100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	100%	111%

- Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu

Terlaksananya Rapat-rapat DPRD tahun 2021, terdiri dari Rapat Paripurna, Rapat Paripura Istimewa, Rapat Paripurna Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Badan Musyawarah

(Banmus), Rapat Kerja, Rapat Badan Anggaran, Rapat Panitia khusus, Rapat badang Anggaran (Banggar) Rapat Komisi.

Pada tahun 2021, ini sedikit berbeda dengan tahun 2020 kemarin dikarenakan adanya perubahan Nomenklatur, dimana pada tahun 2020 semua Kegiatan Rapat-rapat tersebut diakomodir oleh Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin. Sedangkan pada tahun 2021 Rapat-rapat yang sifatnya tentang Penganggaran dan Pengawasan di akomodir oleh Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Fasilitasi Pengawasan. Tentu hal tersebut juga terdapat perbedaan pada pembuatan Risalah Rapat nya. Untuk Bagian Hukum dan Persidangan dari semua rapat-rapat tersebut dibuat yang dibuat risalah hanyalah rapat-rapat paripurna dewan saja. Sedangkan untuk rapat-rapat yang lain hanya dibuatkan Notulen Rapat saja. Pada tahun 2021 tercapai 11 risalah dari 11 Rapat Paripurna Dewan.

No	Nama Risalah	Judul Rapat
1.	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Penetapan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2022 Kamis, 18 Pebruari 2021	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin Penetapan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2022
2.	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kab.Tapin Tentang 4 Raperda Senin, 08 Maret 2021	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kab.Tapin Tentang 4 Raperda Inisiatif DPRD
3.	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Penyampaian Pemberhentian dan Penetapan usulan Nama Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin Senin, 21 Juni 2021	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Pengambilan sumpah / Janji Anggota PAW DPRD Kabupaten Tapin
4.	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Penyampaian Pemberhentian dan Penetapan usulan Nama Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin Senin, 21 Juni 2021	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Penyampaian Pemberhentian dan Penetapan usulan Nama Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin
5.	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Rapat Paripurna Penyampaian 2 (dua) Ranperda dari Pemkab.Tapin dan 1 (satu) Ranperda Inisiatif DPRD Kab.Tapin Rabu, 21 Juli 2021	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Rapat Paripurna Penyampaian 2 (dua) Ranperda dari Pemkab.Tapin dan 1 (satu) Ranperda Inisiatif DPRD Kab.Tapin
6.	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Ranperda dari Pemkab.Tapin dan 1 (satu) Ranperda Inisiatif DPRD Kab.Tapin Rabu, 21 Juli 2021	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Ranperda dari Pemkab.Tapin dan 1 (satu)

7.	Rapat Paripurna Intern DPRD Kab.Tapin dengan Acara Pembentukan Pansus Ranperda Rabu, 21 Juli 2021	Rapat Paripurna Intern DPRD Kab.Tapin dengan Acara Pembentukan Pansus Ranperda
8.	Rapat Intern DPRD Kab.Tapin dengan Acara Pembentukan Panitia Khusus Penyelenggaraan dan Pengendalian Perkembangan Penduduk Tahun 2021 – 2022 Selasa, 10 Agustus 2021	Rapat Intern DPRD Kab.Tapin dengan Acara Pembentukan Panitia Khusus Penyelenggaraan dan Pengendalian Perkembangan Penduduk Tahun 2021 – 2022
9.	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Penyampaian dan Pemandangan Umum Ranperda Pemkab Tapin dan dari Inisiatif DPRD Kab.Tapin Rabu, 27 Oktober 2021	Rapat Paripurna DPRD Kab.Tapin dengan Acara Penyampaian dan Pemandangan Umum Ranperda Pemkab Tapin dan dari Inisiatif DPRD Kab.Tapin
10.	Rapat Paripurna Intern DPRD Kab.Tapin dengan Acara Pengesahan Perubahan Pertama terhadap Peraturan DPRD No 1 Tahun 2019 tentang Tatib DPRD Senin, 08 Nopember 2021	Rapat Paripurna Intern DPRD Kab.Tapin dengan Acara Pengesahan Perubahan Pertama terhadap Peraturan DPRD No 1 Tahun 2019 tentang Tatib DPRD
11.	Rapat Paripurna Intern DPRD Kab.Tapin dengan Acara pembantuan Pansus Perda Inisiatif DPRD Senin, 01 Desember 2021	Rapat Paripurna Intern DPRD Kab.Tapin dengan Acara pembantuan Pansus Perda Inisiatif DPRD

Sumber Bagian Hukum dan Persidangan

Adapun rapat-rapat yang diselenggarakan pada tahun 2021 yang diakomodir oleh Bagian Hukum dan Persidangan diluar Rapat Paripurna adalah sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
1.	Kamis, 07 Jan 2021 (09.00 wita)	Banmus Untuk Kegiatan Bulan Januari 2021	
2.	Senin, 11 Jan 2021 (10.00 wita)	RDP dengan Dinas PMD Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021	
3.	Selasa, 12 Jan 2021 (10.00 wita)	RDP Mengevaluasi Kegiatan Tahun 2020	
4.	Rabu, 13 Jan 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi II dengan Dinas Pendidikan Evaluasi tentang Pembelajaran Daring	
5.	Rabu, 13 Jan 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi III dengan Bappe Litbang, Dinas Kominfo dan PDAM tentang Mengevaluasi Kegiatan Tahun 2020 dan Rencana arah kegiatan Tahun 2021	
6.	Kamis, 14 Jan 2021 (14.00 wita)	Banmus Lanjutan Untuk Kegiatan Bulan Januari 2021 (Lanjutan)	
7.	Selasa, 18 Jan 2021 (10.00 wita)	Banmus Lanjutan Untuk Kegiatan Bulan Januari 2021 (Lanjutan)	
8.	Jum'at, 22 Jan 2021 (09.00 wita)	Rapat Kerja Tentang Evaluasi Realisasi Propemperda TA 2020 dan Rencana Propemperda TA 2021	
9.	Selasa, 26 Jan 2021 (10.00 wita)	Presentasi Perencanaan dan Progres RSUD Baru Kabupaten Tapin	
10.	Senin, 01 Feb 2021 (10.00 wita)	Banmus Untuk Kegiatan Bulan Pebruari 2021	

11.	Selasa, 02 Feb 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Perpres Nomor 33 Tahun 2019 dan Perbup Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	
12.	Senin, 08 Feb 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Evaluasi Perkembangan Kependudukan Tahun 2018-2023 terhadap RPJP dan RPJMD Kabupaten Tapin	
13.	Senin, 08 Feb 2021 (13.00 wita)	Banmus Untuk Kegiatan Bulan Pebruari 2021 (Revisi)	
14.	Senin, 01 Maret 2021 (10.00 wita)	Banmus Untuk Kegiatan Bulan Maret 2021	
15.	Selasa, 02 Maret 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Proyeksi Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 Kabupaten Tapin Terhadap Pemilihan Umum	
16.	Selasa, 02 Maret 2021 (14.00 wita)	RDP Tentang Sinkronisasi Anggaran Perjalanan Dinas dalam Aplikasi SIPD (Permendagri Nomor 70 Tahun 2019)	
17.	Rabu, 03 Maret 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Kebijakan Belajar Daring (Komisi II)	
18.	Rabu, 03 Maret 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Lanjutan Peningkatan Jalan Margasari - Marabahan (Komisi III)	
19.	Rabu, 17 Maret 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Pelaksanaan Tindakan Pencemaran Lingkungan	
20.	Rabu, 31 Maret 2021 (10.00 wita)	Banmus Untuk Kegiatan Bulan April 2021	
21.	Rabu, 31 Maret 2021	Rapat paripurna Tentang Penyampaian LKPJ Bupati Tapin Tahun 2020	
22.	Rabu, 14 April 2021	Rapat Paripurna Tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Bupati Tapin Tahun 2020	
23.	Rabu, 21 April 2021	Rapat pembahasan LKPJ Bupati Tapin	
24.	Senin, 26 April 2021	Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kab.Tapin Terhadap LKPJ Bupati Tapin Tahun 2020	
25.	Senin, 03 Mei 2021 (10.00 wita)	Banmus Untuk Kegiatan Bulan Mei 2021	
26.	Senin, 17 Mei 2021 (10.00 wita)	Banmus Untuk Kegiatan Bulan Mei 2021	
27.	Rabu, 31 Mei 2021 (10.00 wita)	Banmus Untuk Kegiatan Bulan Juni 2021	
28.	Rabu, 02 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi I dengan Dinas Sosial tentang Bantuan yang diterima Fakir Miskin, Dinas Dukcatpil tentang Layanan Pembuatan Identitas, Dinas P3A tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi dan Dinas PMD tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak	
29.	Rabu, 02 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi II dengan Dinas Pendidikan tentang Rencana Sekolah Tatap Muka	
30.	Senin, 07 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP tentang perkembangan penyebaran covid-19 di Kab.Tapin (AKD)	

31.	Senin, 07 Juni 2021 (14.00 wita)	RDP Komisi III dengan PDAM dan Dinas PU PR tentang Status PDAM dan tentang Progres RSUD Datu Sanggul Rantau Baru	
32.	Selasa, 08 Juni 2021 (10.00 wita)	Audensi dengan Yayasan Syech Salman Al Farisi	
33.	Kamis, 10 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi III dengan Dinas LH tentang Persampahan	
34.	Senin, 14 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi III dengan Dishub tentang Perparkiran dll	
35.	Senin, 14 Juni 2021 (10.00 wita)	Banmus untuk Kegiatan Bulan Juni (Lanjutan)	
36.	Kamis, 17 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi I dengan Dinas Naker, Dinas Satpol PP, Dinas P3A dan Dinas Pustarda	
37.	Kamis, 17 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi II dengan BKAD, Inspektorat, Disdik dan Perwakilan Kepsek tentang Tunjangan/Insentif Tenaga Pengajar pada masa pandemi covid 19	
38.	Kamis, 17 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP tentang pelaksanaan pelelangan proyek APBD Kab.Tapin	
39.	Senin, 21 Juni 2021 (14.00 wit)	Penyampaian Pemberhentian dan Penetapan usulan Nama Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin	
40.	Selasa, 22 Juni 2021	Rapat Paripurna tentang Penyampaian Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020 Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin Terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020	
41.	Rabu, 23 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi II tentang Plasma Sawit	
42.	Rabu, 23 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi III tentang Rencana Kegiatan Tahun 2022	
43.	Rabu, 02 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi I dengan Dinas Sosial tentang Bantuan yang diterima Fakir Miskin, Dinas Dukcatpil tentang Layanan Pembuatan Identitas, Dinas P3A tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi dan Dinas PMD tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak	
44.	Rabu, 02 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi II dengan Dinas Pendidikan tentang Rencana Sekolah Tatap Muka	
45.	Senin, 07 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP tentang perkembangan penyebaran covid-19 di Kab.Tapin (AKD)	
46.	Senin, 07 Juni 2021 (14.00 wita)	RDP Komisi III dengan PDAM dan Dinas PU PR tentang Status PDAM dan tentang Progres RSUD Datu Sanggul Rantau Baru	
47.	Selasa, 08 Juni 2021 (10.00 wita)	Audensi dengan Yayasan Syech Salman Al Farisi	
48.	Kamis, 10 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi III dengan Dinas LH tentang Persampahan	

49.	Senin, 14 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi III dengan Dishub tentang Perparkiran dll	
50.	Senin, 14 Juni 2021 (10.00 wita)	Banmus untuk Kegiatan Bulan Juni (Lanjutan)	
51.	Kamis, 17 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi I dengan Dinas Naker, Dinas Satpol PP, Dinas P3A dan Dinas Pustarda	
52.	Kamis, 17 Juni 2021 (10.00 wita)	RDP Komisi II dengan BKAD, Inspektorat, Disdik dan Perwakilan Kepsek tentang Tunjangan/Insentif Tenaga Pengajar pada masa pandemi covid 19	
53.	Selasa, 06 Juli 2021	Rapat pembahasan tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020	
54.	Rabu, 07 Juli 2021	Rapat pembahasan tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020	
55.	Rabu, 14 Juli 2021	Rapat Paripurna tentang Penyampain Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab.tapin Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin Tahun 2020	
56.	Kamis, 15 Juli 2021 (10.00 wita)	Audensi dengan KORMI Kab.Tapin dan Dispora Kab.Tapin	

57.	Senin, 19 Juli 2021 (10.00 wita)	Ekspose dengan Tim Percepatan Penerimaan Digitalisasi Daerah	
58.	Kamis, 15 Juli 2021 (10.00 wita)	Audensi dengan KORMI Kab.Tapin dan Dispora Kab.Tapin	
59.	Senin, 02 Agt 2021 (10.00 wita)	Rapat Banmus untuk Kegiatan Bulan Agustus 2021	
60.	Kamis, 05 Agt 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Tali Asih atau Pesangon kepala Desa Purna Tugas untuk di Anggarkan di APBD (Komisi I)	
61.	Kamis, 05 Agt 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Ketersediaan ruangan dan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Datu Sanggul dan Isolasi terpusat ex SKB By Pass (Komisi II)	
62.	Kamis, 05 Agt 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Aset Daerah (Komisi III)	
63.	Selasa, 10 Agt 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Sarana dan Prasarana, Insentif dan Tunjangan serta Pelayanan di Bidang Kesehatan (Puskesmas) dan Bidang Pendidikan (Pendidikan Dasar) serta sarana dan prasarana (Komisi II)	
64.	Kamis, 12 Agt 2021 (10.00 wita)	Tentang : 1. Ranperda Di Luar Propemperda Tahun 2021 2. Ranperda Perubahan Perda Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 3. Ranperda Perubahan Perda Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Tapin 2014-2034	

		4. Ranperda RDTR Kawasan Strategis Waduk Tapin 5. Ranperda RIPK Kabupaten Tapin	
65.	Senin, 16 Agustus 2021	Rapat Konsultasi Program dan Kegiatan dalam KUPA-PPAS Perubahan APBD TA.2021 Banggar dan Komisi DPRD Kab.Tapin dan SKPD Mitra	
66.	Rabu, 18 Agustus 2021	Rapat Pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA.2021 Antara Banggar DPRD Kab.Tapin dengan TAPD Kab. Tapin	
67.	Kamis, 19 Agustus 2021	Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUPA-PPAS Perubahan APBD TA.2021	
68.	Rabu, 25 Agustus 2021	Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Raperda APBD Perubahan TA.2021	
69.	Kamis, 19 Agt 2021 (14.00 wita)	RDP Tentang Perubahan Status Perusahaan Daerah PDAM (Pansus B)	
70.	Senin, 02 Agt 2021 (10.00 wita)	Rapat Banmus untuk Kegiatan Bulan Agustus 2021	
71.	Kamis, 05 Agt 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Tali Asih atau Pesangon kepala Desa Purna Tugas untuk di Anggarkan di APBD (Komisi I)	
72.	Kamis, 05 Agt 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Ketersediaan ruangan dan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Datu Sanggul dan Isolasi terpusat ex SKB By Pass (Komisi II)	
73.	Kamis, 05 Agt 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Aset Daerah (Komisi III)	
74.	Selasa, 10 Agt 2021 (10.00 wita)	RDP Tentang Sarana dan Prasarana, Insentif dan Tunjangan serta Pelayanan di Bidang Kesehatan (Puskesmas) dan Bidang Pendidikan (Pendidikan Dasar) serta sarana dan prasarana (Komisi II)	
75.	Selasa, 10 Agt 2021 (11.30 wita)	Rapat Intern Tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyelenggaraan dan Pengendalian Perkembangan Penduduk Tahun 2021 - 2022	
76.	Kamis, 12 Agt 2021 (10.00 wita)	Tentang : 1. Ranperda Di Luar Propemperda Tahun 2021 2. Ranperda Perubahan Perda Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 3. Ranperda Perubahan Perda Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Tapin 2014-2034 4. Ranperda RDTR Kawasan Strategis Waduk Tapin 5. Ranperda RIPK Kabupaten Tapin	
77.	Rabu, 01 Sep 2021 (10.00 wita)	Rapat Banmus untuk Kegiatan Bulan September 2021	
78.	Kamis, 02 Sep 2021 (10.30 wita)	Rapat Pembahasan tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Air Minum Kab.Tapin menjadi Perusahaan Umum Daerah/Perseroan Daerah Air Minum Kab.Tapin	
79.	Kamis, 02 Sep 2021 (10.30 wita)	Rapat Pembahasan tentang Ranperda Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Pencabutan Perda Kab.Tapin	

		No 02 Tahun 2007 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan	
80.	Kamis, 02 Sep 2021 (13.30 wita)	Rapat Koordinasi tentang Perkembangan Penduduk	
81.	Senin, 06 September 2021	Rapat Sinkronisasi KUPA-PPAS Perubahan dengan Raperda APBD Perubahan Kab.Tapin TA.2021	
82.	Selasa, 07 September 2021	Rapat Pembahasan tentang Ranperda APBD Perubahan TA.2021 antara Banggar DPRD Kab.Tapin dengan TAPD Kab.Tapin	
83.	Rabu, 08 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan TA.2021 • Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranperda APBD Perubahan TA.2021 	
84.	Kamis, 16 Sep 2021 (10.00 wita)	RDP Koordinasi tentang Perkembangan Kependudukan Ketenagakerjaan	
85.	Senin, 20 Sep 2021 (10.00 wita)	Rakoor tentang Ranperda pada Propemperda dan Ranperda diluar Propemperda	
86.	Kamis, 23 Sep 2021 (10.00 wita)	Audiensi dengan Gelas Budaya Kab.Tapin (Komisi II)	
87.	Kamis, 23 Sep 2021 (10.00 wita)	RDP dengan Dinas Perkimtan tentang Kawasan Kota Harapan (Komisi III)	
88.	Rabu, 29 Sep 2021 (09.30 wita)	Rapat Banmus untuk Kegiatan Lanjutan Bulan September dan Bulan Oktober 2021	
89.	Kamis, 30 Sep 2021 (10.00 wita)	Rapat Kerja tentang Realisasi Kegiatan TA 2021 dan RKA TA 2022 (Komisi II)	
90.	Kamis, 30 Sep 2021 (10.00 wita)	RDP dengan Dinas PU PR Tentang Standarisasi Bahan Fisik dan Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Tapin (Komisi III)	
91.	Rabu, 01 Sep 2021 (10.00 wita)	Rapat Banmus untuk Kegiatan Bulan September 2021	
92.	Senin, 04 Okt 2021 (08.30 wita)	RDP dengan Dinas Perkimtan tentang Realisasi Kegiatan TA 2021 dan RKA TA 2022	
93.	Senin, 04 Okt 2021 (12.30 wita)	RDP tentang Tunjangan Prestasi Kerja (TPP)	
94.	Kamis, 07 Okt 2021 (10.00 wita)	Rapat Koordinasi tentang Evaluasi Kependudukan	
95.	Kamis, 07 Okt 2021 (11.30 wita)	Rapat Pembahasan Panitia Khusus Penyempurnaan Peraturan DPRD No 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD	
96.	Kamis, 07 Okt 2021 (12.30 wita)	Audiensi dengan Perhptani dan KLP	
97.	Rabu, 13 Okt 2021 (10.00 wita)	RDP tentang TPP	
98.	Rabu, 13 Okt 2021 (13.30 wita)	Audiensi tentang TPP dengan Perwakilan Guru Paud se Kab.Tapin	
99.	Kamis, 14 Okt 2021 (12.30 wita)	Audiensi dengan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	

100	Kamis, 14 Oktober 2021	Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2022 Banggar dengan TAPD	
101.	Kamis, 21 Okt 2021 (12.30 wita)	Audiensi dengan FKPM	
102.	Kamis, 21 Oktober 2021	Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2022 Banggar dengan TAPD	
103.	Senin, 04 Okt 2021 (08.30 wita)	RDP dengan Dinas Perkimtan tentang Realisasi Kegiatan TA 2021 dan RKA TA 2022	
104.	Rabu, 27 Okt 2021 (12.00 wita)	Banmus untuk Kegiatan Lanjutan Bulan Oktober dan Bulan Nopember 2021	
105.	Rabu, 27 Oktober 2021	Rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin TA.2022	
106.	Kamis, 28 Okt 2021 (09.30 wita)	Rapat Intern tentang Menyikapi surat-surat permohonan fasilitasi RDPU dari masyarakat	
		Rapat Pembahasan tentang Ranperda perubahan badan hukum perusahaan air minum Kab.Tapin dan Ranperda Pengelolaan Kekayaan Intelektual	
107.	Kamis, 04 Nop 2021 (10.00 wita)	RDP tentang Rencana Pembangunan Gedung KIR dan Penataan Parkir	
108.	Senin, 08 Nopember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan daerah Kab.Tapin Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kab.tapin Tahun 2022 • Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin Tahun 2022 	
109.	Rabu, 10 Nop 2021 (10.30 wita)	RDP tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	
110.	Kamis, 11 Nopember 2021	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022	
111.	Kamis, 18 Nopember 2021	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022 Banggar dengan TAPD Kab.Tapin	
112.	Senin, 22 Nopember 2021	Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2022 dan Pendatanganan Nota persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2022	
No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
113.	Senin, 22 Nop 2021 (10.00 wita)	RDP tentang Inovasi Penataan Kebersihan Sungai dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	

114.	Kamis, 25 Nop 2021 (10.30 wita)	RDP tentang Pegaduan Masyarakat dan Sosialisasi terhadap Pencemaran Lingkungan	
115.	Kamis, 25 Nop 2021 (13.00 wita)	RDP tentang persiapan dan kelengkapan peralatan Gedung Baru Dinas Kominfo dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	
116.	Senin, 29 Nop 2021 (14.00 wita)	Rapat Banmus untuk kegiatan lanjutan Bulan Nopember dan Bulan Desember 2021	
117.	Kamis, 04 Nop 2021 (10.00 wita)	RDP tentang Rencana Pembangunan Gedung KIR dan Penataan Parkir	
118.	Rabu, 10 Nop 2021 (10.30 wita)	RDP tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	
119.	Rabu, 01 Des 2021 (13.00 wita)	RDP tentang Sinkronisasi Pelayanan Penanggulangan Bencana	
120.	Selasa, 07 Des 2021 (10.00 wita)	RDP tentang Seputar Informasi Konflik antara PT.Antang dan PT.TCT	
121.	Rabu, 08 Des 2021 (11.00 wita)	RDP tentang Seputar Informasi Konflik antara PT.Antang dan PT.TCT	
122.	Kamis, 09 Des 2021 (10.00 wita)	RDP tentang Pembebasan Tanah untuk Pembuatan Gedung KIR Dinas Perhubungan	
123.	Senin, 13 Des 2021 (11.00 wita)	RDP tentang Seputar Informasi Konflik antara PT.Antang dan PT.TCT (lanjutan)	
124.	Kamis, 23 Des 2021 (10.00 wita)	Rapat Pansus Perda Inisiatif DPRD	
125.	Kamis, 23 Des 2021 (13.00 wita)	RDP Tentang Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19	
126.	Kamis, 23 Des 2021 (14.00 wita)	RDP tentang Asolisasi Pengusaha Angkutan Tongkang (Transshipment)	
127.	Rabu, 29 Des 2021 (10.00 wita)	Rapat Banmus untuk Kegiatan Lanjutan Bulan Desember 2021 dan Bulan Januari 2022	
128.	Kamis, 30 Des 2021 (10.00 wita)	Rapat Pembahasan Ranperda Pemilihan Kepala Desa Serentak	
129.	Kamis, 30 Des 2021 (11.00 wita)	Rapat Pembahasan Ranperda tentang perubahan Badan Hukum Perusahaan Air Minum	
130.	Kamis, 30 Des 2021 (14.30 wita)	RDP tentang Retribusi Toko Pedagang Pasar Rantau	
131.	Kamis, 23 Des 2021 (14.00 wita)	RDP tentang Asolisasi Pengusaha Angkutan Tongkang (Transshipment)	

Sumber Bagian Hukum dan Persidangan

Sedangkan untuk Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Rapat-rapat yang diakomodir adalah sebagai berikut:

NO	Nama Risalah	Judul Rapat
1.	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab.Tapin TA.2022 Senin, 18 Februari 2021	Rapat Paripurna Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab.Tapin TA.2022

2.	Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penyampaian LKPJ Bupati Tapin Tahun 2020 Rabu, 31 Maret 2021	Rapat paripurna Tentang Penyampaian LKPJ Bupati Tapin Tahun 2020
3.	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Bupati Tapin Tahun 2020 Rabu, 14 April 2021	Rapat Paripurna Tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Bupati Tapin Tahun 2020
4.	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara pembahasan LKPJ Bupati Tapin Rabu, 21 April 2021	Rapat pembahasan LKPJ Bupati Tapin
5.	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penyampaian Rekomendasi DPRD Kab.Tapin Terhadap LKPJ Bupati Tapin Tahun 2020 Senin, 26 April 2021	Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Rekomendasi DPRD Kab.Tapin Terhadap LKPJ Bupati Tapin Tahun 2020
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penyampaian Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020 • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin Terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020 <p>Selasa, 22 Juni 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Paripurna tentang Penyampaian Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020 • Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin Terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020

7.	Rapat Pembahasan Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020 Selasa, 06 Juli 2021	Rapat Pembahasan tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020
8.	Rapat pembahasan DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020 Rabu, 07 Juli 2021	Rapat pembahasan tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020
9.	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penyampain Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab.tapin Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin Tahun 2020 Rabu, 14 Juli 2021	Rapat Paripurna tentang Penyampain Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab.tapin Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin Tahun 2020
10.	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Konsultasi Program dan Kegiatan dalam KUPA-PPAS Perubahan APBD TA.2021 Banggar dan Komisi DPRD Kab.Tapin dan SKPD Mitra Senin, 16 Agustus 2021	Rapat Konsultasi Program dan Kegiatan dalam KUPA-PPAS Perubahan APBD TA.2021 Banggar dan Komisi DPRD Kab.Tapin dan SKPD Mitra
11.	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan Rancangan KUPA-PPAS PerubahanAPBD TA.2021 Antara Banggar DPRD Kab.Tapin dengan TAPD Kab. Tapin Rabu, 18 Agustus 2021	Rapat Pembahasan Rancangan KUPA-PPAS PerubahanAPBD TA.2021 Antara Banggar DPRD Kab.Tapin dengan TAPD Kab. Tapin
12.	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penandatanganan Nota	Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUPA-PPAS Perubahan APBD TA.2021

	Kesepakatan terhadap KUPA-PPAS Perubahan APBD TA.2021 Kamis, 19 Agustus 2021	
13	Rapat Paripurna Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Raperda APBD Perubahan TA.2021 Rabu, 25 Agustus 2021	Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Raperda APBD Perubahan TA.2021
14.	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Sinkronisasi KUPA-PPAS Perubahan dengan Raperda APBD Perubahan Kab.Tapin TA.2021 Senin, 06 September 2021	Rapat Sinkronisasi KUPA-PPAS Perubahan dengan Raperda APBD Perubahan Kab.Tapin TA.2021
15.	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan Ranperda APBD Perubahan TA.2021 antara Banggar DPRD Kab.Tapin dengan TAPD Kab.Tapin Selasa, 07 September 2021	Rapat Pembahasan Ranperda APBD Perubahan TA.2021 antara Banggar DPRD Kab.Tapin dengan TAPD Kab.Tapin
16.	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan TA.2021 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranperda APBD Perubahan TA.2021 Rabu, 08 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan TA.2021 • Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranperda APBD Perubahan TA.2021
17.	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2022 Banggar dengan TAPD Kamis, 14 Oktober 2021	Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2022 Banggar dengan TAPD

18.	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2022 Banggar dengan TAPD Kamis, 21 Oktober 2021	Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2022 Banggar dengan TAPD
19.	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin TA.2022 Rabu, 27 Oktober 2021	Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin TA.2022
20.	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penyampaian Rancangan Peraturan daerah Kab.Tapin Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kab.tapin Tahun 2022 Dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin Tahun 2022 Senin, 08 Nopember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan daerah Kab.Tapin Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kab.tapin Tahun 2022 • Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin Tahun 2022
21.	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022 Kamis, 11 Nopember 2021	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022
22.	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022 Banggar dengan TAPD Kab.Tapin Kamis, 18 Nopember 2021	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022 Banggar dengan TAPD Kab.Tapin

23.	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2022 dan Pendatangan Nota persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2022 Senin, 22 Nopember 2021	Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2022 dan Pendatangan Nota persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2022
-----	--	---

Sumber Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Berdasarkan data tersebut diatas pada Rapat Akhir Monitoring dan Evaluasi Sekretariat DPRD disimpulkan bahwa Seluruh Risalah Rapat-rapat DPRD dapat diselesaikan tepat waktu. Sehingga Untuk Indikator Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 90% dengan capaian 111% didapat dari rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Risalah Rapat Dewan Yang Terselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Risalah Rapat Yang Harus Dibuat}} \times 100\%$$

$$\frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga untuk capaian Kinerjanya didapat dari rumus:

$$\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

Capaian untuk indikator kinerja Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu ditahun 2021 adalah 111%

Untuk indikator Persentase Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu, adapun program dan kegiatan yang menunjang indikator tersebut adalah sbb:

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	532,487,700
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	160,374,000
Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	27,949,800
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	21,074,800
Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	27,949,800

Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	27,949,800
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	55,449,800
Peningkatan Kapasitas DPRD		372,113,700
Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	372,113,700

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	73,6%	113%

- Persentase aspirasi masyarakat yang terkomodir
Untuk indikator Persentase aspirasi masyarakat yang terkomodir terealisasi sebesar 73,6% dari target 65% dengan capaian tahun 2021 113,2% didapat dari rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Aspirasi Yang Terakomodir}}{\text{Jumlah Aspirasi Yang Masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{14}{19} \times 100\% = 73.6\%$$

Sehingga untuk capaian Kinerjanya didapat dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{73,6\%}{65\%} \times 100\% = 113,2\%$$

Capaian untuk indikator kinerja Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir ditahun 2021 adalah 111%.

Untuk indikator Persentase Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir, adapun program dan kegiatan yang menunjang indikator tersebut adalah sbb:

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	343,706,400
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	343,706,400
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	19,500,000
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terpenuhinya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3,836,400
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	320,370,000

Persentase aspirasi masyarakat yang terkomodir Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin tahun 2021 diperoleh dari aspirasi yang disampaikan masyarakat sebanyak 19 (sembilan belas) aspirasi yang terdiri dari 2 aspirasi secara langsung berupa demo/unjuk rasa, 10 dialog/audensi. Secara keseluruhan semua aspirasi tersebut didahului dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.

Aspirasi masyarakat terhadap pelayanan semakin tinggi dan kompetitif seiring dengan dinamika politik di masyarakat membuat masyarakat semakin sadar dan paham akan haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPRD merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terhadap suatu permasalahan sesuai dengan bidang tugas dan wewenang DPRD. Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi/tuntutan diterima dan disampaikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin kepada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tapin dalam hal ini Komisi yang membidangnya sesuai dengan tuntutan masyarakat atau organisasi masyarakat. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin atas saran dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin.

Dialog/audensi dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari masyarakat atau organisasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tapin. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis dialog/audensi diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin atas saran dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin. Adakalanya dialog/audensi dilaksanakan secara langsung pada saat penyampaian aspirasi melalui demo/unjuk rasa dikarenakan permintaan massa atau organisasi masyarakat, Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin atau Komisi yang dianggap perlu

diadakan pembicaraan lebih lanjut untuk penjelasan atau penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Penyampaian aspirasi tertulis melalui surat yang ditujukan ke DPRD Kabupaten Tapin disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin selanjutnya didistribusikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin ke Komisi yang membidangnya berdasarkan disposisi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin. Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin sebatas memfasilitasi setiap aspirasi/tuntutan yang masuk dan hanya memantau sejauh mana aspirasi/tuntutan tersebut ditindaklanjuti.

Aspirasi Masyarakat yang Masuk dan Difasilitasi Tahun 2021

No	Penyampai Aspirasi	Jenis Aspirasi Masyarakat	Fasilitasi Aspirasi Masyarakat
1.	Pengurus Yayasan Syech Salman Al Farisi	Audensi	Audensi dengan Yayasan Syech Salman Al Farisi
2.	Perwakilan Kepsek se-Kabupaten Tapin	Perihal Tunjangan/Insentif Tenaga Pengajar pada masa pandemi covid 19	RDP Komisi II dengan BKAD, Inspektorat, Disdik dan Perwakilan Kepsek tentang Tunjangan/Insentif Tenaga Pengajar pada masa pandemi covid 19
3.	KORMI Kab.Tapin	Audensi	Audensi dengan KORMI Kab.Tapin dan Dispora Kab.Tapin
4.	Koperasi Sawit	Perihal pembagian deviden	
5.	Gelas Budaya Kab.Tapin	Audiensi	Audiensi dengan Gelas Budaya Kab.Tapin (Komisi II)
6.	Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Tapin	Perihal Tunjangan Prestasi Kerja (TPP)	RDP tentang Tunjangan Prestasi Kerja (TPP)
7.			
8.	Perhaptani dan KLP	Audiensi	Audiensi dengan Perhaptani dan KLP
9.	Perwakilan Guru PAUD se Kab.Tapin	Perihal Tunjangan Guru PAUD se Kab.Tapin	RDP tentang TPP dengan Perwakilan Guru Paud se Kab.Tapin
10.	Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	Audiensi	Audiensi dengan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
11.	FKPM	Audiensi	Audiensi dengan FKPM
12.	Warga masyarakat Desa Kalumpang	Permohonan fasilitasi CSR	
13.	Warga masyarakat Desa Kalumpang	Laporan pencemaran limbah angkutan batubara dari PT.AGM	Pertemuan dengan PT. AGM dan kunjungan lapangan

14.	Sopir lepas angkutan dan pekerja tongkang untuk PT.AGM	Unjuk rasa perihal dampak Konflik antara PT.AGM dan PT.TCT (pertama)	RDP tentang Seputar Informasi Konflik antara PT.Antang dan PT.TCT
15.	Sopir lepas angkutan dan pekerja tongkang untuk PT.AGM	Unjuk rasa perihal dampak Konflik antara PT.AGM dan PT.TCT (kedua)	RDP tentang Seputar Informasi Konflik antara PT.Antang dan PT.TCT1
16.	Asolisasi Pengusaha Angkutan Tongkang (Transshipment)	RDP tentang Asolisasi Pengusaha Angkutan Tongkang (Transshipment)	RDP tentang Asolisasi Pengusaha Angkutan Tongkang (Transshipment)
17.	Perwakilan Pedagang Toko Pasar Rantau	Perihal Retribusi Toko Pedagang Pasar Rantau	RDP tentang Retribusi Toko Pedagang Pasar Rantau
18.			
19.			

Sumber Bagian Hukum dan Persidangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%		

- Persentase Pokok- Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD

Indikator Kinerja Persentase raperda yang tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100% Persentase tersebut didapatkan dari rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pokok pikiran DPRD Yang dinyatakan Selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Pokok pikiran yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{305}{305} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga untuk capaian Kinerjanya didapat dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Untuk indikator Persentase Pokok-pokok Pikiran yang dinyatakan selaras dengan RPJMD, adapun program dan kegiatan yang menunjang indikator tersebut adalah sbb:

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	3,836,400
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3,836,400
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terpenuhinya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3,836,400

Aspirasi yang disampaikan dalam Reses, dicatat, didiskusikan dalam forum konsultasi publik, kemudian hasilnya dirangkum dalam bentuk Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapin yang akan disampaikan dalam pembahasan penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin. Tidak semua pokok-pokok pikiran tersebut dapat terealisasi dalam bentuk anggaran kegiatan.

Dalam perumusan rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil Reses atau penjarangan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planing* (SIPD), yang selanjutnya dikaji dalam suatu mekanisme perencanaan. Proses kajian tersebut meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi permasalahan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dan dikelompokkan ke dalam program/kegiatan sesuai dengan perangkat daerah terkait,
2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut,
3. Analisis kesesuaian indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan,
4. Pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari perangkat daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas, dan
5. Perumusan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD

Kajian terhadap pokok pikiran ini diperlukan untuk mendapatkan pokok pikiran yang selaras dengan RPJMD, berikut Pokok Pikiran DPRD yang terakomodir dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 dan keselarasannya dengan RPJMD.

Pokok Pokok Pikiran DPRD	Pokok Pokok Pikiran DPRD yang Selaras dengan RPJMD	Pokok Pokok Pikiran DPRD yang Selaras Masuk dalam APBD TA. 2021
305	305	200

POKOK - POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

DAPIL 1

No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
1.	Pembuatan Drainase Desa Ayunan Papan RT/RW.003/001 blok B gg. Mufakat.	1 PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Lanjutan
2.	Pembangunan drainase Desa Budi Mulya Desa Bataratat (lanjutan).	1 PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Lanjutan tahap ke II
3.	Pengaspalan Jl.Sidodadi RT/RW05/04 Desa Shabah.	1 PAKET	BUNGUR	DINAS PUPR	Rusak parah
4.	Pembangunan Pengaman tebing Sei. Asam RT. 08 Kel. Rangda malingkung	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Sangat di butuhkan masyarakat
5.	Pengaspalan Makadam Blok. D RT/RW 004/002 Desa Ayunan Paapan.	1 PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Rusak berat
6.	Pembuatan drainase Blok. D RT/RW. 004/002 Desa Ayunan Papan	1 PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Lanjutan tahap Ke II
7.	Pembangunan siring sei. Tapin Desa Banua Halat Kiri RT. 002.	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Sangat di butuhkan
8.	Pembuatan Box Culvert Jl. Bir Ali Desa Banua Halat Kiri RT. 002 Kec. Tapin Utara.	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Sangat di butuhkan

9.	Pembangunan siring Sei. Panata desa Banua Halat kiri.	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Lanjutan tahap ke 2
10.	Pengaspalan (Makadam) Jalan Sungai Bamban Desa Binderang RT.04.	1 / PAKET P = 600 M L = 3 M	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Jalan untuk kelancaran aktifitas masyarakat sehari-hari
11.	Pengaspalan pasir goreng (Latasir) Jalan AMD Desa Binderang RT.06.	1 / PAKET P = 700 M L = 3 M	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Jalan untuk kelancaran aktifitas masyarakat sehari-hari
12.	Lanjutan pembuatan saluran tersier Sungai Matarau Sawah Saro RW.03 Kel.Rangda Malingkung.	1 / PAKET P = 50 M	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Saluran Tersier untuk menahan tanah sawah agar tidak terjadi pengikisan saat banjir datang
13.	Pembuatan drainase Jalan Tembus Sapang Kel.Kupang RT.10 RW.03	1 / PAKET P = 540 M L = 0,9 M	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Drainase agar air tidak menggenangi di jalan
14.	Pembuatan siring dan peningkatan badan jalan Desa Binderang RT.01 RW.01 Lokasi : Jl. Sungai Impat	1 / PAKET P = 1000 M L = 5M	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Jalan untuk kelancaran aktifitas masyarakat sehari-hari
15.	Peninggian jalan cor beton Desa Perintis Raya RT.03 RW.02 Jl. Samping Kantor Perdagangan	1 / PAKET P = 305	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Jalan untuk kelancaran aktifitas masyarakat sehari-hari
16.	Pengaman tebing samping Tk. Al-Quran Darul Mustagfirin Karang Putih RT.08 RW.03 Desa Lokpaikat	1 / PAKET P = 100 M L = 4 M	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Agar tidak terjadi longsor
17.	Pengaman tebing Sungai Tapin Kelurahan Kupang RT.06 RW.II	1/ PAKET P = 100 M L = 4 M	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Agar tidak terjadi longsor

18.	Pembuatan drainase dan pengerasan Jalan PMDKI Ds.Binderang RT.05 RW.03	1 / PAKET P=1250 ML=500	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Drainase agar air tidak menggenangi di jalan
19.	Pembuatan pagar dan cor beton Kuburan Muslimin Darul Mustagfirin Lokpaikat RT.08 RW.03	1 / PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Agar lebih rapi dan tertata
20.	Pembuatan jalan tani Padang Tembus Baruh Kapar Ds. Banua Hanyar	1 / PAKET P = 700 ML= 2M	TAPIN UTARA	DINAS PERTANIAN	Jalan untuk keperluan hasil pertanian dan kegiatan masyarakat sekitar.
21.	Pembuatan tabat Sungai Maliau RT.03 RW.01 Ds. Lokpaikat	1 / PAKET PANJANG SAYAP KIRI / KANAN = 20 M LEBAR = 6M	LOKPAIKAT	DINAS PERTANIAN	Tabat untuk mengalirkan dan mengatur arus air ke persawahan dengan lancar.
22.	Lanjutan pembuatan Jalan Tani Panjajaan Desa Lokpaikat RT.03 RW.01	1 / PAKET P = 750 ML = 3 M	LOKPAIKAT	DINAS PERTANIAN	Jalan untuk keperluan hasil pertanian
23.	Pembuatan Jalan Tani Kelurahan Kupang RT.10 RW.03	1 / PAKET P = 600 ML = 3 M	TAPIN UTARA	DINAS PERTANIAN	Jalan untuk petani menuju lahan pertanian dan mempermudah membawa hasil pertaniannya
24.	Rehab Ruang Kelas SDN Rantau Kanan 1	1 / PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PENDIDIKAN	Ruang kelas untuk kelancaran belajar mengajar
25.	Pembangunan Pagar Sekolah SDN Sabah Kecamatan Bungur	1 / PAKET	BUNGUR	DINAS PENDIDIKAN	Pagar untuk keamanan sekolah

26.	Pembangunan ruang guru/kantor dan pagar SDN Lokpaikat 3 Desa Lokpaikat	1 / PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PENDIDIKAN	Pagar untuk keamanan sekolah
27.	Pembangunan ruang guru/kantor SDN Puncak Harapan	1 / PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PENDIDIKAN	Ruang guru untuk kelancaran administrasi belajar mengajar
28.	Pembangunan ruang Kelas dan pagar Tk. Trisula	1 / PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PENDIDIKAN	Ruang kelas untuk kelancaran mengajar
29.	Rehab Pagar SDN Bitahan Baru Kec. Lokpaikat	1 Paket	LOKPAIKAT	DINAS PENDIDIKAN	Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar
30.	Rehab Pagar, Pintu Gerbang dan Plank Sekolah SDN Rangda Malingkung 3 Kec. Tapin Utara	1 Paket	TAPIN UTARA	DINAS PENDIDIKAN	Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar
31.	Pembangunan Pagar SDN Lokpaikat 3 Kec. Lokpaikat	1 Paket	LOKPAIKAT	DINAS PENDIDIKAN	Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar
32.	Pembangunan Ruang UKS SDN Lokpaikat 1 Kec. Lokpaikat	1 Paket	LOKPAIKAT	DINAS PENDIDIKAN	Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar
33.	Pembangunan WC Murid dan Pengecatan Bangunan Sekolah SDN Lokpaikat 1 Kec. Lokpaikat	1 Paket	LOKPAIKAT	DINAS PENDIDIKAN	Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar
34.	Pemasangan Paving Block Halaman Puskesmas Lokpaikat	1 Paket	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang datang ke Puskesmas

35.	Pengaspalan Jalan Desa RT. 03 Desa Budi Mulya Kec. Lokpaikat	1 Paket	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Untuk mempermudah transportasi masyarakat
36.	Pengaspalan Jalan Desa RT. 04 - RT. 05 Desa Budi Mulya Kec. Lokpaikat	1 Paket	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Untuk mempermudah transportasi masyarakat
H. RAKHMAT HIDAYAT, SE					
37.	Pengaspalan Jalan Desa Rantau Bujur Sepanjang 3000 Meter Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur	3000 Meter	BUNGUR	DINAS PUPR	Memperlan car jalan untuk transportasi masyarakat
38.	Pengaspalan Jalan Desa Rantau Bujur2- Limpana Desa Rantau Bujur Ke. Bungur.	3000 Meter	BUNGUR	DINAS PUPR	Untuk memudahkan masy. utk mengangku t hasil pertanian
39.	Pembuatan Jalan Produksi H.Masri RT.04 RW.02 Balunan Haduk Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat	1 PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	memudahkan masyarakat untuk mengangku t hasil pertanian dan karet
40.	Normalisasi Sungai Bingkuang RT.01 RW.01 Desa Lokpaikat Kecamatan Lokapikat	1 PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Untuk Mengairi Lahan Persawahan Dan Pertanian Untuk Masyarakat Bercocok Tanam , Berkebun serta Untuk Keperluan Sarana Air Bersih
41.	Pembuatan Saluran Tersier Lokbatang RT.12 RW.03 Desa Lokpaikat Kec.Lokpaikat	1 PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Untuk Mengairi Lahan Persawahan

					Dan Pertanian Untuk Masyarakat Bercocok Tanam , Berkebun serta Untuk Keperluan Sarana Air Bersih
42.	Pembuatan Cor Beton Jalan Desnitasi Goa Beramban Desa Baramban Kecamatan Piani	1 PAKET	PIANI	DINAS PUPR	Untuk memudahkan masyarakat yang memiliki panorama komplet bagi wisata alam sehingga dapat memperkejakan masyarakat desa baramban
43.	Pengaman Tebing Sei.Goa Liang Air Desa Baramban Kecamatan Piani	1 PAKET	PIANI	DINAS PUPR	Untuk Penahan Banjir Dan Longsor
44.	Pembangunan Jembatan Box Culvert Perbatasan RT.3 Dan RT.4 RW.2 Desa Antasari Hilir Kecamatan Tapin Utara	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian
45.	Pembuatan Siring Sei.Kariwaya RT.3 RW.2 Desa Antasari Hilir Kec.Tapin Utara	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	memperlan car saluran agar tidak terjadi banjir
46.	Pembuatan Tabat Saluran Air Desa Antasari Hilir Kecamatan Tapin Utara	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk Mengatur Keluar Masuk Air

					Untuk Bercocok Tanam Bagi Masyarakat.
47.	Normalisasi Sei.Baruh Besar Desa Antasari Hilir Kecamatan Tapin Utara	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk Mengurangi Debet Air Supaya Jangan kebanjiran
48.	Pembuatan Saluran Drainase RT.3 RW.4 Desa Banua Padang Kecamatan Bungur	1 PAKET	BUNGUR	DINAS PUPR	Untuk Memperlan car Saluran Air
49.	Pembuatan Cor Beton Paving RT.3 RW.4 Desa Banua Padang Kecamatan Bungur	1 PAKET	BUNGUR	DINAS PUPR	Untuk memudahkan masyarakat untuk mengangku t hasil pertanian dan karet
50.	Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Shabah RT.01 Kecamatan Bungur.	1 BUAH	BUNGUR	DINAS PERTANIAN	Untuk memudahkan masyarakat untuk mengangku t hasil pertanian
51.	Pengaspalan Jalan Pasar Desa Linuh RT.01 RW.01	200 Meter	BUNGUR	DINAS PUPR	Untuk memudahkan masyarakat menuju pasar
52.	Pengaspalan Jalan Desa Linuh menuju Desa Rantau Bujur RT.01 RW.01	120 Meter	BUNGUR	DINAS PUPR	Menahan Tebing dari erosi
53.	Lanjutan Pembuatan siring penahan tebing RT.01 RW.01	100 Meter	BUNGUR	DINAS PUPR	Menahan Tebing dari erosi
54.	Pembuatan Siring Penahan Tebing	100 Meter	BUNGUR	DINAS PUPR	Menahan Tebing dari erosi

55.	Pengaspalan Jalan Talikur rt.04 Desa Linuh Panjang 2500 Meter	2500 Meter	BUNGUR	DINAS PUPR	Memudahkan Masyarakat
56.	Pembuatan Pagar Dan Pelapon Mesjid Nurul Ihsan RT.04 Dusun Talikur Desa Linuh	1 PAKET	BUNGUR	DINAS PUPR	Keamanan dan Keindahan Mesjid
57.	Pengaspalan Jalan Talikur RT.03 Desa Linuh Panjang 4000 Meter	4000 Meter	BUNGUR	DINAS PUPR	Memudahkan Masyarakat
58.	Lanjutan Pembuatan Drainase RT. 04 Panjang 500 Meter	500 Meter	BUNGUR	DINAS PUPR	Melancarkan Aliran Air
59.	Pengaspalan Jalan Limpana RT.04 Desa Rantau Bujur Panjang 1000 Meter	1000 Meter	BUNGUR	DINAS PUPR	Memudahkan Masyarakat
60.	Pengaspalan Jalan Limpana RT.05 Desa Rantau Bujur Panjang 1000 Meter	1000 Meter	BUNGUR	DINAS PUPR	Memudahkan Masyarakat
61.	Lanjutan Pembuatan Cor Beton RT.004 Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara	1 Paket	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	-
62.	Pembuatan Drainase Cor Beton RT.04 (Lanjutan Tahap Empat) Desa Shabah Kec. Bungur	1 Paket	BUNGUR	DINAS PUPR	Panjang = 500 Meter
63.	Pembuatan Draenase Cor Beton RT.09 Desa Shabah Kec. Bungur	1 Paket	BUNGUR	DINAS PUPR	Panjang = 400 Meter
64.	Pembuatan Draenase Cor Beton RT.06 (Lanjutan Tahap Tiga) Desa Shabah Kec. Bungur	1 Paket	BUNGUR	DINAS PUPR	Panjang = 500 Meter
65.	Pembuatan Jalan Tani RT.01 Desa Bungur Baru Kec. Bungur	1 Paket	BUNGUR	DINAS PERTANIAN	-
66.	Pembuatan Cor Beton Jalan Tani RT.001 Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara	1 Paket	TAPIN UTARA	DINAS PERTANIAN	-

67.	Pembuatan Jalan Usaha Tani Sungai Impat Desa Binderang Kec. Lokpaikat	1 Paket	LOKPAIKAT	DINAS PERTANIAN	L = 3 Meter P = 350 Meter
68.	Pembuatan Jalan Tani RT.02 dan RT.03 Desa Jingah Babaris Kec. Tapin Utara	1 Paket	TAPIN UTARA	DINAS PERTANIAN	P = 900 Meter L = 2 Meter
69.	Pembuatan Jalan Usaha Tani kelompok Tani Semi Mulya RT.04 (Lanjutan) Desa Shabah Kec. Bungur	1 Paket	BUNGUR	DINAS PERTANIAN	P = 400 Meter
70.	Pembuatan Pagar SDN Shabah RT. 02 RW. 01 Desa Shabah Jalan Sido Dadi	1 PAKET	BUNGUR	DINAS PENDIDIKAN	Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar
71.	Lanjutan Pengaspalan Makadam Jalan Sara Desa Labuhan Tembus Bitahan Baru Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara (Tahap II)	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk memudahkan transportasi masyarakat
72.	Peningkatan Pengaspalan Makadam Jalan Pertanian RT. 04 RW. 03 Tembus RT. 06 RW. 04 Desa Shabah Jalan Sido Dadi Kecamatan Bungur	1 PAKET	BUNGUR	DINAS PUPR	Untuk memudahkan transportasi masyarakat
73.	Lanjutan Pembuatan Drainase Jalan Labuhan RT. 08 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk menahan badan jalan dan mengatasi banjir
74.	Pembuatan Jembatan Box Culvert Sungai Asam Kel. Rangda Malingkung Tahap 2	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk memudahkan transportasi masyarakat
75.	Penataan Halaman dan Pagar Kuburan Muslimin Al Mu'in Desa Banua Hanyar Kec. Tapin Utara	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk menjaga keamanan serta membuat

					indah dan asri
76.	Pembuatan Drainase Desa Ayunan Papan RT. 01 Blok A Kec. Lokpaikat	1 PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Untuk menahan badan jalan dan mengatasi banjir
77.	Pembuatan Drainase Desa Ayunan Papan RT. 03 Blok B Kec. Lokpaikat	1 PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Untuk menahan badan jalan dan mengatasi banjir
78.	Pembuatan Drainase Desa Ayunan Papan RT. 04 Blok D Kec. Lokpaikat	1 PAKET	LOKPAIKAT	DINAS PUPR	Untuk menahan badan jalan dan mengatasi banjir
79.	Lanjutan Pembuatan Tapir Tabat Sungai Eks. ABRI Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk mencegah longsor dan mengatasi banjir
80.	Lanjutan Pembuatan Drainase Jalan Kalakasirang RT. 12 Kel. Kupang	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk menahan badan jalan dan mengatasi banjir
81.	Lanjutan Peningkatan/Pengaspalan Jalan Pantai Bahagia Kel. Kupang	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk mempermudah transportasi masyarakat
82.	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Angah Kel. Kupang	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk mempermudah transportasi masyarakat
83.	Pembuatan Jalan Usaha Tani Tajun RT. 07 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PERTANIAN	Untuk memudahkan angkutan pertanian

84.	Pembuatan Jalan Usaha Tani Sapang RT. 12 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PERTANIAN	Untuk memudahkan angkutan pertanian
85.	Pengaspalan Jalan Usaha Tani Tajun RT.07 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara	1 PAKET	TAPIN UTARA	DINAS PUPR	Untuk memudahkan transportasi masyarakat

**POKOK - POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022
DAPIL 2**

NO	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
86.	Pembangunan ruang guru dan ruang kepala sekolah dasar negeri hatungun 2	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PENDIDIKAN	-
87.	Perbaikan halaman sekolah dasar negeri hatungun 2	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PENDIDIKAN	-
88.	Pembangunan pagar sekolah dasar negeri hatungun 2	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PENDIDIKAN	-
89.	Makadam Latasir RT 06 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang.	366 Meter	BINUANG	DINAS PUPR	Blok P
90.	Makadam Latasir RT.07 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang.	695 Meter	BINUANG	DINAS PUPR	Jalan kuburan
91.	Rabat Beton RT.03 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang.	174 Meter	BINUANG	DINAS PUPR	Blok N
92.	Pengaspalan Jalan Desa Padang Sari	1 Buah	BINUANG	DINAS PUPR	Memperlan cararus transportasi desa
93.	Pembangunan Bendungan Dan Saluran Tersier Desa Padang Sari Kec.Binuang	1 Buah	BINUANG	DINAS PUPR	pertanian masyarakat bercocok tanam, berkebun

					serta air bersih
94.	Pembangunan Drainase Desa Padang Sari Kecamatan Binuang	1 Buah	BINUANG	DINAS PUPR	Untuk memperlancar saluran yang supaya tidak terjadi banjir
95.	Perkerasan Jalan Tani (PIR Nes.12 Blok B Dan C) Sepanjang 8.600 Meter Desa Mekar Sari Kecamatan Binuang	1 Buah	BINUANG	DINAS PUPR	Untuk mempermudah masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian
96.	Pembuatan Drainase Jalan Nes 12 Sepanjang 3000 Meter Desa Mekar Sari Kecamatan Binuang	1 Buah	BINUANG	DINAS PUPR	Untuk mempermudah masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian
97.	Pembangunan Jembatan Box Culvert Sebanyak 6 Buah RT.05 Dan RT.06 RW.03 Desa Mekar Sari Kecamatan Binuang	6 Buah	BINUANG	DINAS PUPR	Memperlancar jalan untuk transportasi masyarakat
98.	Pembangunan Tabat / Embung Saluran Tersier RT.01 RW.01 Desa Mekar Sari Kecamatan Binuang	1 Buah	BINUANG	DINAS PUPR	Untuk mengairi lahan persawahan dan pertanian untuk masyarakat bercocok tanam, berkebun serta untuk keperluan sarana air bersih.
99.	Makadam Latasir Panjang 130 Meter Lebar 3 Meter Alamat	390 Meter Persegi	BINUANG	DINAS PUPR	Panjang = 130

	Jln. Gang Perumahan SMAN 1 Binuang				Lebar = 3 Meter
100.	Drainase Panjang 260 Alamat Gang Perumahan SMAN 1 Binuang	260 Meter	BINUANG	DINAS PUPR	-
101.	Pembangunan Atap Lapangan Volly Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang.	1 Buah	BINUANG	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Disamping kantor desa pualam sari
102.	Pembuatan Jalan Tani Desa Padang Sari Kecamatan Binuang	1 Buah	BINUANG	DINAS PERTANIAN	Untuk mempermudah masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian
103.	Pembuatan Jalan Tani + Rabat Beton Desa Serawi Puting RT.02 Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang	1 Buah	BINUANG	DINAS PERTANIAN	Untuk mempermudah masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian
104.	Pembuatan Jalan Tani + Jembatan 1 Buah Desa Karang Putih RT.03 Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang	1 Buah	BINUANG	DINAS PERTANIAN	Untuk mempermudah masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian
105.	Pembuatan jalan Tani + Cordeker Desa Karang Putih RT.04 Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang	1 Buah	BINUANG	DINAS PERTANIAN	Untuk mempermudah masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian
106.	Pembuatan Jalan Usaha Tani RT.02 RW.01 Sepanjang 500	1 Buah	BINUANG	DINAS PERTANIAN	Untuk mempermudah

	Meter Desa Mekar Sari Kecamatan Binuang				masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian
107.	Pembuatan Jalan Tani RT.05 RW.03 Sepanjang 1000 Meter Desa Mekar Sari Kecamatan Binuang	1 Buah	BINUANG	DINAS PERTANIAN	Untuk mempermudah masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian
108.	Pembuatan Pagar Sekolah Dasar (SD) Pualam Sari 1	1 Paket	BINUANG	DINAS PENDIDIKAN	-
109.	Paving Blok Jalan Raya Barat RT. 02 RW. 01 Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang	1 Paket	BINUANG	DINAS PUPR	-
110.	Paving Blok Jalan Raya Barat RT.03 RW.01 Kel. Raya Belanti Kecamatan Binuang	1 Paket	BINUANG	DINAS PUPR	-
111.	Pembangunan Gedung Pemuda dan Olah Raga Sport Center Tenis H. ADI Desa Pualam Sari Kec. Binuang	1 Buah	BINUANG	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-
112.	Pengaspalan Hotmix Jalan Desa Salam Babaris RT. 05 (Jalan Masuk Gereja) Tembus Desa Pantai Cabe Muka Masjid Kec. Salam Babaris	1323 M	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk Memudahkan transportasi masyarakat
113.	Pengaspalan Hotmix Jalan Desa Salam Babaris RT. 02 Muka Puskesmas Tembus Desa Pantai Cabe RT. 12 Kec. Salam Babaris	700 M	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk Memudahkan transportasi masyarakat

114.	Pengaspalan Hotmix Jalan Samping Masjid Pasar Desa Salam Babaris RT. 01 Kec. Salam Babaris	290 M	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk Memudahkan transportasi masyarakat
115.	Pengaspalan Hotmix Jalan Desa Salam Babaris RT. 03 Tembus Desa Pantai Cabe RT. 13 Kec. Salam Babaris	325 M	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk Memudahkan transportasi masyarakat
116.	Pengaspalan Hotmix Jalan Samping Polsek Salam Babaris Sampai Simpang Jalan Houling Desa Pantai Cabe RT. 15 Kec. Salam Babaris	450 M	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk Memudahkan transportasi masyarakat
117.	Pengaspalan Hotmix Jalan Desa Pantai Cabe RT. 09 Menuju RT. 10 Desa Pantai Cabe Kec. Salam Babaris	515 M	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk Memudahkan transportasi masyarakat
118.	Pembuatan Saluran Air (Drainase) Dan Tanah Uruk Jl. Batu Nyaring Rt.001 Rw.001 Desa Matang Batas.	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PUPR	Demi kenyamanan dan keamanan masyarakat sebagai pengguna jalan, dengan hal tersebut tentunya sangat penting untuk membuat saluran drainase dan tanah uruk agar jalan tidak lagi licin dan dapat dengan nyaman

					digunakan masyarakat
119.	Pengaspalan Latisis Jalan Hubung antara Jl. Batu Nyaring RT.001 dengan Jl. Batu Belah RT.002 RW.001 Desa Matang Batas	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PUPR	Demi kelancaran guna mendukung sektor pertanian, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Tentunya hal ini menjadi prioritas guna menciptakan kenamaan akses masyarakat
120.	Pengaspalan Latisis Jl. Batu Belah RT.002, Desa Matang Batas	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PUPR	Demi kelancaran guna mendukung sektor pertanian, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Tentunya hal ini menjadi prioritas guna menciptakan kenamaan akses masyarakat di Jl. Batu Belah RT.002
121.	Pengaspalan Jalan Latisis Desa Hatungun Kecamatan Hatungun, RT.006 RW.003	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PUPR	Demi kenyamanan dan keamanan masyarakat sebagai

					<p>pengguna jalan, dengan hal tersebut tentunya sangat penting untuk melakukan pengaspalan jalan pada Jalan Hubung Desa Matang Batas dengan Desa Hatungun Kecamatan Hatungun, RT.006 RW.003 sepanjang 3 KM.</p>
122.	<p>Uruk Jalan Dengan Base Course Di Cempaka Rw. 005 Kelurahan Raya Belanti</p>	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PUPR	<p>Demi menciptakan akses jalan masyarakat dalam beraktifitas, maka sangat diperlukannya Siring Uruk Jalan di Jalan Teluk Kaluang, Kelurahan Raya Belanti yang terbuat dari Base Course sepanjang 1000 x 2 meter</p>

123.	Pengaspalan Jalan Kampung Batu Perahu RT.005, RW.00, Desa Matang Batas	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PUPR	Guna memperlancar akses transportasi sehingga dapat dengan mudah masyarakat mengangkut hasil Pertanian, Perkebunan dan lain-lain, tentunya hal ini menjadi Prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
124.	Peningkatan Jalan dengan Latahir di Jl. Cempaka Ray 3 RT.12/05 Kelurahan Raya Belanti	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PUPR	Demi meningkatkan taraf perekonomian dan memberikan sarana lalu lintas warga Kelurahan yang memadahi, tentunya hal ini menjadi sebuah prioritas
125.	Pembangunan Siring Badan Jalan di Jl. Cempaka Ray 5 RW.05 Kelurahan Raya Belanti	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PUPR	Demi meningkatkan kelancaran arus transportasi dan perekonomian

					an masyarakat, maka hal ini tentunya menjadi sangat penting
126.	Pembangunan Jembatan Ulin di Cempaka Ray 2 RT.012 RW.005	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PUPR	Demi meningkatkan akses bagi masyarakat, yang dikarenakan akses jembatan ini sangat penting digunakan sebagai akses untuk mengangkut hasil pertanian, juga akses menuju pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan
127.	Peningkatan Jalan dengan LATASIR di Jl. Cempaka Ray. 4 RT.013 RW.005 Kelurahan Raya Belanti	1 Paket	HATUNGUN	DINAS PUPR	Demi kelancaran guna mendukung sektor pertanian, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Tentunya hal ini menjadi prioritas guna menciptakan

					n kenyamanan akses masyarakat di Jl. Cempaka Ray. 4 RT.013 RW.005 Kelurahan Raya Belanti
128.	Peningkatan jalan Adipati pulau luluk Jl. Adipati Pulau Luluk Kelurahan Binuang	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	-
129.	Pengerasan / pengaspalan Jalan Tembus lingkaran Binuang Baru Jl. KUA – MTsN 2 Tapin	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	-
130.	Pengerasan jalan & siring jalan tembus balai benih Jalan SMP Negri 1 RT.05 16 B Kecamatan Binuang	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	-
131.	Rehab beton komplek Cendrawasih Serawi Tengah	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	-
132.	Pengaspalan jalan RT. 02 RW. 01 Desa Pulau Pinang	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	-
133.	Siring / Tapir Drainase Jalan Sukamaju Kelurahan Karang Putih Kecamatan Hatungun	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PUPR	-
134.	Drainase dan cor siring poros jalan Kabupaten Tapin Desa Kambang Kuning RT 03	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	-
134.	Drainase dan cor siring poros jalan Kabupaten Tapin	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	-

	Desa Kambang Kuning RT 07				
136.	Pembangunan akses jalan pasar Hatungun Jalan raya timur Hatungun	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PUPR	-
137.	Pembangunan siring jalan lintas salba sampai hatungun Desa Batu Hapu RT.12	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	-
138.	Pembangunan jembatan jalan lintas salba sampai hatungun Desa Batu Hapu RT. 12	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	-
139.	Pelebaran badan jalan Jalan Hatungun - Binuang/ A. Yani Pura	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	-
140.	Paving Beton Jalan Tani Sidorejo Kelurahan Karang Putih RT.08	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	-
141.	Pengerasan jalan usaha tani Jalan Serawi Tengah RT.05 dan RT 16 B	1 PAKET	BINUANG	DINAS PERTANIAN	-
142.	Pembangunan PUSKESDES Jalan SMA Negeri Binuang RT.003 RW.02	1 PAKET	BINUANG	DINAS KESEHATAN	-
143.	Pembangunan pagar SDN 1 HATUNGUN Desa Hatungun Jalan Raya Timur RT.01 RW.01	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PENDIDIKAN	-
144.	Pembangunan Gedung Serba Guna Olah Raga Jl. SMAN 1 Binuang RT.003 RW.002 Kelurahan Karang Putih Kec. Binuang	1 BUAH	BINUANG	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-
145.	Cor semen bahu jalan 1 Meter kiri dan kanan di RT.05 / RW. 02 Kelurahan Raya	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Pelebaran Jalan

	Belanti Panjang Menyesuaikan				
146.	Cor semen bahu jalan 1 meter kiri dan kanan di RT.07 Kelurahan Raya Belanti Panjang Menyesuaikan	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Pelebaran Jalan
147.	Pembuatan siring jalan di Teluk Kaluang RT 10. RW.4 Kelurahan Raya Belanti	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Pembuatan Siring Jalan
148.	Pembuatan jalan tani di RT.06 Jalan Pantai Tengah Kelurahan Raya Belanti	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Pembuatan Jalan Tani
149.	Pengurukan halaman Belakang Madrasah Abdan Syakura RT.05 / RW.06 Raya Belanti	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Pengurukan halaman Belakang Madrasah Syakura
150.	Pembuatan tempat wudhu dan WC majelis ta'lim tabu darat ar-rahman	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Pembuatan tempat wudhu dan toilet
WAHYU NUGROHO RANORO					
151.	(Lanjutan)Pengaman Tebing Checkdam Nes 8B Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris	1 PAKET	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk menah nbadan jalan danmen gatasiba njir
152.	Pengaspalan Jalan RW.03 dan RW.04 Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris	1 PAKET	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untu kme muda hkant ransp ortasi masy araka t
153.	(Lanjutan)Pengaman Tebing RW.01 Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris	1 PAKET	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untukm encegahl ongsor danmen gatasiba njir

154.	Pengaman Tebing Desa Suato Baru Kecamatan Salam Babaris	1 PAKET	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk mencegah longsor dan menegatasibanjir
155.	(Lanjutan) pembuatan Drainase Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris	1 PAKET	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk menahnbadan jalan dan menegatasibanjir
156.	(Lanjutan) Pembuatan Drainase dan Culvert Jalan Poros Desa Kambang Habang Lama - Batu Hapu Kecamatan Salam Babaris	1 PAKET	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk menahnbadan jalan dan menegatasibanjir
157.	(Lanjutan) Pengaspalan Jalan Desa Kambang Habang Baru RW.04RT.07 Kecamatan Salam Babaris	1 PAKET	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk memudahkan transportasi masyarakat
158.	(Lanjutan) Pengaspalan Jalan Desa Kambang Habang Baru RW.04 RT.08 Kecamatan Salam Babaris	1 PAKET	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk memudahkan transportasi masyarakat
159.	Lanjutan Pembuatan Drainase dan Culvert Desa Harapan Masa Kec. Tapin Selatan	1 PAKET	TAPIN SELATAN	DINAS PUPR	Untuk menahnbadan jalan dan menegatasibanjir

160.	Pembangunan Jembatan RW.03 Desa Suato Lama Kec.Salam Babaris	1 PAKET	SALAM BABARIS	DINAS PUPR	Untuk memudahkan transportasi masyarakat
161.	Pengaspalan Macadam Jalan Desa Sawang RT.10Kec. Tapin Selatan	1 PAKET	TAPIN SELATAN	DINAS PUPR	Untuk memudahkan transportasi masyarakat
162.	Pembangunan Drainase di Jl. Telaga Ara RT.004 RW.002 Desa Tungkap sepanjang 1000 meter	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Dikarenakan masih belum adanya drainase di Jl. Telaga Ara RT.004 RW.002 Desa Tungkap mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat sekitar jika terjadi banjir, juga menyebabkan lingkungan masyarakat sekitar menjadi bau akibat dari saluran air yang tidak dapat berfungsi

					secara maksimal di daerah tersebut
163.	Peningkatan Jalan Mutiara (Pengaspalan) RT. 003 RW.001 Desa Tungkap	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Tentunya hal ini menjadi Prioritas karena kondisi jalan yang ada sudah tidak memungkinkan lagi dalam menunjang aktifitas para warga di Jalan Mutiara RT. 003 RW.001 Desa Tungkap dan tentunya hal ini sangat penting dan sangat berguna bagi warga
164.	Peningkatan Jalan Sarang Semut RT.008 RW.003 Desa Tungkap	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Kondisi jalan yang ada sudah tidak memungkinkan lagi dalam menunjang aktifitas para warga di Jalan Sarang Semut RT.008 RW.003 Desa Tungkap

					dan tentunya hal ini sangat penting dan menjadi prioritas
165.	Pembangunan Drainase Jl. Sarang Semut RT.008 RW.003 Desa Tungkap sepanjang 900 meter (Lanjutan)	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Hal ini tentunya menjadi Prioritas karena saluran air yang ada di Jl. Sarang Semut RT.008 RW.003 Desa Tungkap masih belum berfungsi secara optimal. Jalan ini digunakan oleh masyarakat lingkungan desa Tungkap khususnya dan masyarakat Kecamatan Binuang pada umumnya untuk melakukan aktivitas sehari-har
166.	Pembangunan Jembatan Jl. Tinggiran RT.002 RW.001 Desa Gunung Batu	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Tentunya hal ini menjadi Prioritas karena kondisi jembatan

					yang ada di Jl. Tinggiran RT.002 RW.001 Desa Gunung Batu sudah tidak memungkinkan lagi untuk menunjang aktivitas warga karena sudah rusak
167.	Peningkatan Jalan Sepak Bola Haruban Desa Tungkap	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Demi kenyamanan dan keamanan masyarakat sebagai pengguna jalan, dengan hal tersebut tentunya sangat penting untuk melakukan pengaspalan jalan pada Peningkatan Jalan Sepak Bola Desa Tungkap
168.	Peningkatan Jalan Saluran RT. 004 RW.002 Desa Tungkap	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Demi kenyamanan dan keamanan masyarakat sebagai pengguna jalan, dengan hal tersebut tentunya

					sangat penting untuk melakukan Peningkatan Jalan Saluran RT. 004 RW.002 Desa Tungkap
169.	Peningkatan Jalan Mutiara (Pengaspalan) RT.003 RW.001 Desa Tungkap	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Guna memperlancar akses transportasi sehingga dapat dengan mudah masyarakat mengangkut hasil Pertanian, Perkebunan dan lain-lain, tentunya hal ini menjadi Prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jalan Mutiara RT.003 RW.001 Desa Tungkap
170.	Pembangunan Drainase Jalan Saka Permai RT.002 RW.001 Desa Tungkap sepanjang 3000 meter	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Dikarenakan masih belum adanya drainase di Jalan Saka Permai RT.002

					RW.001 Desa Tungkap mengakibat kan terhambatny a aktivitas masyarakat sekitar jika terjadi banjir, juga menyebabk an lingkungan masyarakat sekitar menjadi bau akibat dari saluran air yang tidak dapat berfungsi secara maksimal di daerah tersebut
171.	Pengaspalan Jalan Irigasi RT.004 RW.002 Desa Tungkap	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Tentunya hal ini menjadi Prioritas karena kondisi jalan yang ada sudah tidak memungkin kan lagi dalam menunjang aktifitas para warga di Jalan Irigasi RT.004 RW.002 Desa Tungkap dan tentunya hal

					ini sangat penting dan sangat berguna bagi warga
172.	Perkerasan Jalan Irigasi RT.006 RW.003 Desa Tungkap	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Demi menciptakan akses jalan masyarakat dalam beraktifitas, maka sangat diperlukannya Perkerasan Jalan Irigasi RT.006 RW.003 Desa Tungkap
173.	Peningkatan Jalan Irigasi RT. 006 RW.003 Desa Tungkap	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Demi kenyamanan dan keamanan masyarakat sebagai pengguna jalan, dengan hal tersebut tentunya sangat penting untuk melakukan Peningkatan Jalan Irigasi RT. 006 RW.003 Desa Tungkap
174.	Pembangunan Jalan Tani Sei.Limau RT. 002 RW.001 Desa Tungkap sepanjang 500 meter (Lanjutan)	1 PAKET	BINUANG	DINAS PERTANIAN	Tentunya hal ini menjadi Prioritas karena jalan tani yang ada di Jl. Sei.Limau

					RT. 002 RW.001 Desa Tungkap masih belum dapat berfungsi secara optimal untuk menunjang segala aktivitas para petani yang ada di sekitar tempat tersebut, sehingga sangat diperluangkannya peningkatan dan pengoptimalan jalan tani di daerah tersebut.
175.	Pembangunan Jalan Tani Sei Kuwangan (Lanjutan) RT.005 RW.002 Desa Tungkap	1 PAKET	BINUANG	DINAS PERTANIAN	Tentunya hal ini menjadi Prioritas karena jalan tani yang ada di Jl.Sei.Kuwangan RT.005 RW.002 Desa Tungkap masih belum dapat berfungsi secara optimal untuk menunjang

					segala aktivitas para petani yang ada di sekitar tempat tersebut, sehingga sangat diperlukannya peningkatan dan pengoptimalan jalan tani di daerah tersebut
176.	Pembangunan Jalan Tani Tembusan Belanti, Desa Tungkap	1 PAKET	BINUANG	DINAS PERTANIAN	Guna memperlancar akses transportasi sehingga dapat dengan mudah masyarakat mengangkut hasil Pertanian, Perkebunan dan lain-lain, tentunya hal ini menjadi Prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jalan Tembusan Belanti, Desa Tungkap
177.	Pemasangan paving block untuk halaman SDN 2 HATUNGUN	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PENDIDIKAN	Sangat Penting

178.	Pembuatan pagar SDN 2 HATUNGUN	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PENDIDIKAN	Sangat Penting
179.	Pembuatan pagar SDN 1 TARUNGIN	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PENDIDIKAN	Sangat Penting
180.	Pembuatan paving block di halaman SDN 1 TARUNGIN	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PENDIDIKAN	Sangat Penting
181.	Pembuatan jalan tani rabat beton Panjang 200 M Lebar 2,5 M Tebal 15 CM	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PUPR	Sangat Penting Untuk Menunjang Kegiatan Pertanian
182.	Pembuatan drainase dan siring sepanjang 2 KM	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PUPR	Sangat Penting
183.	Pembuatan rabat beton panjang 250 M Lebar 2 M Tebal 15 CM	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PUPR	Sangat Penting
184.	Pembuatan rabat beton panjang 500 M Lebar 2 M Tebal 20 Cm Untuk mempermudah akses jalan ketempat perkebunan milik bumdes	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PUPR	Sangat Penting
185.	Pembuatan paving block di halaman masjid hijratul janah asam rendah 30 M X 30 M	1 PAKET	HATUNGUN	SEKRETARIA T DAERAH	Sangat Penting
186.	LanjutanPembangunanPagarSDNA. YaniPura1DesaA. YaniPuraKec.Binuang	1 PAKET	BINUANG	DINAS PENDIDIKAN	Untukmen unjangkegiatan belajarme ngajar
187.	PembuatanPagarSDNSwato1DesaSu atoLamaKec.SalamBabaris	1 PAKET	SALAMBABARIS	DINAS PENDIDIKAN	Untukmen unjangkegiatan belajarme ngajar
188.	PeningkatanJalan HotmixdiRT.1,R T.3,RT.10,RT.11	1 PAKET	BINUANG	DINAS PUPR	Untu kme muda

	Desa A. Yani Pura Kec. Binuang				hkan transportasi masyarakat
189.	Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kem bang Kuningruas P antai Batu RT.06- 05 Kecamatan Hat ungun	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PUPR	Untuk kemudahan transportasi masyarakat
190.	Pengaspalan Macadam Jalan Pasuda'an dan Jalan Ami Ami Desa Burakai RT.04s/dRT.06K ec. Hatungun	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PUPR	Untuk kemudahan transportasi masyarakat
191.	Pembangunan 3B uah Jembatan Slab Culvert Desa Tim baan RT.03 Kec. T apin Selatan	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PUPR	Untuk kemudahan transportasi masyarakat
192.	Pengaspalan Macad am Jalan Kabupaten Suato Tatakan- Rumintin Kec. Tapi n Selatan	1 PAKET	HATUNGUN	DINAS PUPR	Untuk kemudahan transportasi masyarakat

POKOK - POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022
DAPIL 3

No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/ BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERAN GAN
193.	Pembuatan jalan menuju makam keramat Desa Paul Kecamatan Bakarangan.	1 PAKET /400 1	Bakarangan	DINAS PUPR	Mempermu dah jalan akses ke pemakaman keramat
194.	Pembuatan drainase Desa Paul Kecamatan Bakarangan.	1 PAKET /300 1	Bakarangan	DINAS PUPR	Memperlan car saluran air
195.	Pembuatan pengaman tebing sungai hantu walaran Desa Parigi Simbar Kecamatan Bakarangan.	/1 PAKET 400 1	Bakarangan	DINAS PUPR	Mencegah longsor
196.	Pembuatam trebon tahap 2 lapangan sepak bola Desa Parigi Simbar Kecamatan Bakarangan.	1 PAKET	Bakarangan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-
197.	Pembuatan vapping blok dan drainase kuburan muslimin Jalan Aroba warga Pelita Kelurahan Rangda Malinggkung Kecamatan Tapin Utara.	1 PAKET	Tapin Utara	DINAS PUPR	-
198.	Pembuatan pengaman tebing/siring sungai Desa Sungai Bahalang Kecamatan Tapin Tengah.	1 PAKET /600 1	Tapin Tengah	DINAS PUPR	Mencegah longsor dan memperlan car aliran sungai
199.	Pembuatan los atau toko Pasar Keraton Kelurahan Rantau Kanan	1 PAKET	Tapin Utara	DINAS PUPR	-

	Kecamatan Tapin Utara.				
200.	Pembuatan drainase Desa Pandulangan RT. 1 dan RT. 2.	1 PAKET /550 1	Tapin Tengah	DINAS PUPR	Memperlan car saluran air
201.	Pembuatan /rehab TK Aisyah Desa Ayunan Papan Kelurahan Bitahan.	1 PAKET	Lokpaikat	DINAS PENDIDIKAN	-
202.	Rehabilitasi pagar sekolah SD Tangkawang Kecamatan Bakarangan.	1 PAKET /350 1	Bakarangan	DINAS PENDIDIKAN	Untuk rehab pagar yang sudah mau roboh
203.	Rehab ruang guru/kantor SD Bakarangan 1.	1 PAKET /600 1	Bakarangan	DINAS PENDIDIKAN	Rehab ruang guru yang sudah tidak layak
204.	Pembangunan toilet dan sanitasi SD Bakarangan Kecamatan Bakarangan.	1 PAKET /400 1	Bakarangan	DINAS PENDIDIKAN	Toilet yang ada sudah tidak layak
205.	Pembangunan toilet dan sanitasi SD Labung Kecamatan Tapin Tengah.	1 PAKET /300 1	Bakarangan	DINAS PENDIDIKAN	Toilet yang ada sudah tidak layak
206.	Pembangunan Pagar Beton SMPN 1 Tapin Tengah Kec. Tapin Tengah.	1 PAKET	Tapin Tengah	DINAS PENDIDIKAN	Meningkatkan keamanan dan ketertiban
207.	Pembangunan Pagar Beton SDN Pematang Karang Kecamatan Tapin Tengah Seberang Kandang Sapi H. Bondan (Panjang 50 M Tinggi 2 M).	1 PAKET	Tapin Tengah	DINAS PENDIDIKAN	Untuk keamanan siswa dan fasilitas belajar
208.	Pembangunan pagar SDN Pandahan 1 Kec.	1 PAKET	Tapin Tengah	DINAS PENDIDIKAN	Untuk keamanan siswa dan

	Tapin Tengah (Panjang 50 M).				fasilitas belajar
209.	Pembangunan Pagar Beton SDN Hiyung 1 Kec. Tapin Tengah.	1 PAKET	Tapin Tengah	DINAS PENDIDIKAN	Untuk keamanan siswa dan fasilitas belajar
210.	Pembuatan sumur bor dalam Pesantren Putri Siti Khadijah Desa Pematang Karang RT. 005 RW 002 Kec. Tapin Tengah (GR. AHMAD BARMAWI).	1 BUAH	Tapin Tengah	DINAS PUPR	Sangat dibutuhkan oleh masyarakat
211.	Pembuatan pagar dan urugan Alkah Muslimin Sungai Kandang Desa Sungai Rutas Kec. CLS.	1 PAKET	Candi Laras Selatan	DINAS PUPR	Sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk tidak terjadinya penyusutan tanah
212.	Rehab Sungai Pasiban Serta Ray Desa Sei. Rutas RT 02 Kec. CLS	1 PAKET	Candi Laras Selatan	DINAS PUPR	Sangat dibutuhkan masyarakat pengendalian banjir
213.	Rehab Sungai Bakulapai Serta Ray desa Sei. Rutas RT 02 Kec. CLS	1 PAKET	Candi Laras Selatan	DINAS PUPR	Sangat dibutuhkan masyarakat pengendalian banjir
214.	Peningkatan Jalan Desa Sungai Puting Kec. CLU	1 PAKET	Candi Laras Utara	DINAS PUPR	Sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk Berlintas
215.	Pembuatan Drainase Desa Bakarangan RT. 02 Kec. Bakarangan	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	Sangat dibutuhkan untuk kelancaran saluran air
216.	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	Penunjang akses jalan

	Paul RT.04 RW 02 Kec. Bakarangan				pengguna masyarakat
217.	Peningkatan Cor Paving Jalan Tani Desa Pematang Karangan RT.01 Samping Rumah Amang Upik Kec. Tapin Tengah (Lebar 1.5 M)	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PERTANIAN	Sangat diperlukan masyarakat untuk menunjang pertanian
218.	Pengaspalan Latasir Jl. Majelis Darul Muthafa Desa PK Hulu	Panjang 200 M Lebar 3 M	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk memperlancar jalan Masyarakat
219.	Pengaspalan Latasir Jl. Desa Pematang Karangan Desa Kepayang RT.002 (Lebar 3 M)	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk memperlancar jalan Masyarakat
220.	Pembuatan Pengaman Tebing Siring Sungai Seberang Rumah Awah Desa pk. Hulu RT 02 RW 01(Panjang 300 M)	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	agar tidak romboh/ jebol
221.	Pembangunan Tebing RT 03 Desa Tangkawang	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	untuk penahan siring air agar tidak jebol
222.	Lanjutan Cor Paving Jl Rimba Desa Sungai Salai Hulu	1 PAKET	CANDI LARAS UTARA	DINAS PUPR	Untuk memperlancar jalan Masyarakat
223.	Pasangan Siring Jalan Sepanjang 2400 M Desa PK.Hilir RT 06 (Lanjutan)	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk memperlancar jalan Masyarakat
224.	Normalisasi Sungai Komplek	1 PAKET	CANDI LARAS UTARA	DINAS PUPR	Untuk memperlancar air
225.	Lanjutan Pengerukan Sungai Bakutapi (Tahap	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk memperlancar air

	II) Desa Pebaungan Hulu				
226.	Pembuatan Jembatan Ulin Desa Marampiau Hulu	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk memudahkan masyarakat yang mau menyebarkan sungai
227.	Pembuatan Jembatan Ulin Desa Marampiau Hilir	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk memudahkan masyarakat yang mau menyebarkan sungai
228.	Pengarukan Rehab Sungai Barutas Kecil Desa Marampiau Hilir Rt 05	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk memperlancar air
229.	Rehab/Normalisasi Sungai Saka Mampai Desa Buas-Buas RT 07 RW. 03	1 PAKET	CANDI LARAS UTARA	DINAS PUPR	Untuk memperlancar aliran air
230.	Normalisasi Sungai Udi Desa Masta	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	Untuk memperlancar aliran air
231.	Lanjutan Pembuatan Pengaman Tebing RT.04 RW.02 Tembus RT.05 RW.02 Desa PK Hilir Kec.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	
232.	Pembuatan Jalan Tani Desa Marampiau Hilir RT 03 RW 02	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	Dinas Pertanian	Untuk memperlancar jalan Masyarakat yang mau ke kebun
233.	Pembuatan Jalan Tani Desa Marampiau Hilir RT 04 RW 02	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	Dinas Pertanian	Untuk memperlancar jalan Masyarakat

					yang mau ke kebun
234.	Pembuatan Jalan Tani Desa Gadung Hilir Rt 03	1 PAKET	BAKARANGAN	Dinas Pertanian	Untuk memperlancar jalan Masyarakat yang mau ke kebun
235.	Pembuatan Jalan Tani Pulau Sandah Tembus Ke Desa Batang Lantik Desa Sarawi Rt. 003	1 PAKET	TAPIN TENGAH	Dinas Pertanian	Untuk memperlancar jalan Masyarakat yang mau ke kebun
236.	Pembangunan tebing DS. Parigi Kacil RT. 001 s/d 002 RW. 2 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	-
237.	Pembuatan Drainase DS. Parigi Kacil RT. 003 s/d RT. 004 RW. 002 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	-
238.	Pengaspalan jalan Datu Panjang DS. Parigi Kacil RT.02 RW. 01 Kecamatan Bakarangan Kab. Tapin	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	-
239.	Pembuatan siring jalan DS. Pandahan RT.01 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-
240.	Pembuatan siring jalan DS. Pandahan RT.02 tembus desa Sungai Bahalang	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-

	Kecamatan Tapin Tengah				
241.	Pembuatan jalan DS. Pandahan Tembus PK. Hilir RT.04 s/d RT. 06 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-
242.	Pembuatan pondasi pagar kuburan DS. Pandahan RT.06 Kecamatan Tapin Tengah	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-
243.	Pembuatan MCK DS. PK Hilir RT. 05 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS KESEHATAN	-
244.	Pembuatan Tabat Sungai Kalang RT.06 RW.01 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-
245.	Pembuatan Tabat Sungai Pambalokan RT.03 DS. Hiyung Kecamatan Tapin Tengah.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-
246.	Pembuatan siring pengaman tebing DS. Pandahan RT.06 Kec. Tapin Tengah.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-
247.	Pembuatan siring jalan DS. Pandahan RT.07 Kecamatan Tapin Tengah.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-
248.	Pembuatan Tabat sungai Hiyung RT.04 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-

249.	Pembuatan Pagar sekolah SD. Negeri Pandahan 1 DS. Pandahan Kecamatan Tapin Tengah.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PENDIDIKAN	-
250.	Pembuatan Pagar sekolah SD Negeri Pandahan 2 DS. Pandahan Kecamatan Tapin Tengah.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PENDIDIKAN	-
251.	Pembuatan jalan usaha tani DS. Hiyung RT.03 RW.02 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PERTANIAN	-
252.	Peningkatan jalan usaha tani DS. PK Hilir RT.04 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PERTANIAN	-
253.	Peningkatan jalan usaha tani DS. PK Hilir RT.05 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PERTANIAN	-
254.	Pembuatan MCK DS. Pandulangan RT.03 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
255.	Pembuatan MCK DS. Pandulangan RT.04 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
256.	Pembuatan Drainase Depan Kubur Muslimin(Lanjutan)	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	Untuk memperlancar saluran air sehingga tidak banjir

257.	Pembuatan Pondasi Jalan Baru (Lanjutan)	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk Akses Jalan Warga Desa
258.	Pengaspalan Jalan Depan Kantor Camat Bakarangan tembus Kulihi	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	Untuk Peningkatan Kenyamanan dan Keamanan Jalan Warga Desa
259.	Pembuatan Jalan Lingkungan / Pemukiman (Lanjutan)	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk Akses Jalan Warga Desa
260.	Pembuatan Jalan Lingkungan / Pemukiman (Lanjutan)	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk Akses Jalan Warga Desa
261.	Pembuatan Jembatan Ulin Lingkungan / Pemukiman	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk Akses Jalan Warga Desa
262.	Pengaspalan Jalan Desa Sungai Rutas Hulu RT 01 dan RT 02 Kec. Candi Laras Selatan	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk Peningkatan Kenyamanan dan Keamanan Jalan Warga Desa
263.	Pengaspalan Jalan Desa Sungai Rutas Hulu RT 04 Kec. Candi Laras Selatan	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk Peningkatan Kenyamanan dan Keamanan Jalan Warga Desa
264.	Pembangunan / Pembuatan Rehab Jembatan Cor Beton Depan Rumah Hj. Anyang	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk Akses Jalan Warga Desa
265.	Pembangunan Siring Jalan Desa Margasari Hulu RT 02 Kec. Candi Laras Selatan	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk Mencegah Erosi serta Peningkatan Kualitas Jalan Dalam Menunjang

					Akses Jalan Warga Desa
266.	Pembuatan Jalan Lingkungan Depan Makam Datu Yamani Hujjail	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk Akses Jalan Warga Desa
267.	Pengaspalan Jalan Lingkungan samping rumah Ikul tembus Bakarangan	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk Peningkatan Kenyamanan dan Keamanan Jalan Warga Desa
268.	Pembangunan Siring Jembatan Sungai Hantu	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk Mencegah Erosi serta Peningkatan Kualitas Jembatan Dalam Menunjang Akses Jalan Warga
269.	Peningkatan / Pembangunan dan Rehab Jembatan Sungai Rutas Hulu (Untuk bisa di lewati dari Roda 2 menjadi Roda 4)	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PUPR	Untuk Peningkatan Fasilitas Infrastruktur dan Akses Jalan Warga Desa
270.	Pembangunan / Pembuatan Pagar Posyandu	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	Untuk Meningkatkan Keamanan dan Kualitas Fasilitas Infrastruktur
271.	Pembuatan Jalan Tani Samping Sarang Walet Ummi Syarifah (Lanjutan)	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PERTANIAN	Untuk Akses Jalan Warga Desa Dan Menunjang Akses Hasil Tani

272.	Pembuatan Jalan Tani Samping Sawah Nasar (Lanjutan)	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PERTANIAN	Untuk Akses Jalan Warga Desa Dan Menunjang Akses Hasil Tani
273.	Pembuatan Jalan Tani Cor Paving Samping Sawah Anang Ilmi (Lanjutan)	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PERTANIAN	Untuk Akses Jalan Warga Desa Dan Menunjang Akses Hasil Tani
274.	Pembuatan DAM Irigasi	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PERTANIAN	Untuk Menunjang Pengairan Dan Peningkatan Hasil Tani
275.	Pemasangan Siring dan Urugan Halaman SDN Baulin	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PENDIDIKAN	Untuk Mencegah Banjir dan atau genangan Air serta Meningkatkan Kualitas Fasilitas Infrastruktur
276.	Pemasangan Siring Batu Gunung dan Urugan Halaman SMPN 3 Candi Laras Utara	1 PAKET	CANDI LARAS UTARA	DINAS PENDIDIKAN	Untuk Mencegah Banjir dan atau genangan Air serta Meningkatkan Kualitas Fasilitas Infrastruktur
277.	Perbaiki Gedung Sekolah SDN	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS PENDIDIKAN	Untuk Peningkatan

	Baringin B (SD Inti)				Kenyaman dan Kualitas Fasilitas Infrastruktur
278.	Pengadaan 1 Unit Ambulance Untuk Dua Desa, Desa Sungai Rutas dan Desa Sungai Rutas Hulu Kec. CLS	1 PAKET	CANDI LARAS SELATAN	DINAS KESEHATAN	Untuk Mobilisasi Warga Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
279.	Penataan Halaman dan Pembuatan Pagar SDN Andhika Kecamatan Tapin Tengah	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PENDIDIKAN	Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar
280.	Penataan Halaman dan Pembuatan Pagar SDN Pandulangan 2 Kecamatan Tapin Tengah	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PENDIDIKAN	Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar
281.	Rehab Tabat Beton Sungai Matang Durian Desa Sungai Bahalang RT. 004 RW. 002 Kec. Tapin Tengah	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk mendukung pertanian
282.	Lanjutan Pembuatan Siring Sungai Desa Sungai Bahalang RT. 003 RW. 002 Kec. Tapin Tengah	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk mencegah longsor dan mendukung pertanian
283.	Lanjutan Pembuatan Siring Sungai Jalan Transmigrasi RT.	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk menahan badan jalan dan

	001 sampai dengan RT. 002 Desa Sungai Bahalang Kec. Tapin Tengah				mengatasi banjir
284.	Pembuatan Siring Tebing Sungai Desa Hiyung RT. 02 RW. 01 Kec. Tapin Tengah	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk mendukung sarana transportasi masyarakat di sungai sekaligus menjaga kebersihan sungai dan pengguna lainnya
285.	Pembuatan Siring Jalan Pasangan Batu Desa Mandurian RT. 01 Kec. Tapin Tengah	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk menahan badan jalan dan mengatasi banjir
286.	Penataan Halaman dan Pagar Kuburan Muslimin Miftahul Jannah Desa Mandurian Kec. Tapin Tengah	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk menjaga keamanan serta membuat indah dan asri
287.	Pembuatan Siring Sungai Pondok Desa Andhika Kec. Tapin Tengah	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk mencegah longsor dan mendukung pertanian
288.	Pembuatan Tersier Desa Andhika Kecamatan Tapin Tengah	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	Untuk mendukung pertanian
289.	Pembangunan Drainase Desa Parigi RT. 01 RW. 01 Kec. Bakarangan	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	Untuk menahan badan jalan dan mengatasi banjir
290.	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Desa Parigi RT. 01 RW. 01 Kec. Bakarangan	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	Untuk mencegah longsor

291.	Pembuatan Rabat Beton Jalan RT. 05 dan Halaman Poskesdes Desa Kaladan RT. 05 Kecamatan Candi Laras Utara	1 PAKET	CANDI LARAS UTARA	DINAS PUPR	Untuk memudahkan transportasi masyarakat
292.	Pembuatan Drainase Jalan Desa Waringin RT. 04 RW. 02 Kec. Bakarangan	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PUPR	Untuk menahan badan jalan dan mengatasi banjir
293.	Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Waringin RT. 04 Kec. Bakarangan	1 PAKET	BAKARANGAN	DINAS PERTANIAN	Untuk memudahkan angkutan pertanian
294.	Pondasi dan Timbunan Jl. Padat Karya RT.01 RW.01	P 4.000M L 2M	BAKARANGAN	DINAS PUPR	-
295.	Rehabilitas Jalan Usaha Tani RT.03 RW.02	P 100M L 2M	BAKARANGAN	DINAS PERTANIAN	-
296.	Jalan Tani Baruh Jambu RT 03 RW 02	P 1500M L 2M	BAKARANGAN	DINAS PERTANIAN	-
297.	Pembuatan Jalan Lingkungan Matang Birik RT.02 RW.01	P 700 M L 2.5M	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-
298.	Jalan Tani RT.02 Desa Pandahan	P 1000M L 3M	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-
299.	Pembuatan Jalan Tani RT.3 RW. 1 Desa P.K Hilir	P 500M L 3 M	TAPIN TENGAH	DINAS PERTANIAN	-
300.	Jalan Tani H.Undum RT.04 RW.02	P 300M L 2M	BAKARANGAN	DINAS PERTANIAN	-
301.	Pembuatan Paving Jalan Dan COR beton di Jalan Desa Paul RT.003	P 300M L 2M	BAKARANGAN	DINAS PUPR	-
302.	Pembuatan Paving Jalan Dan COR beton di Jalan Desa Paul RT.004	P 200M L 2M	BAKARANGAN	DINAS PUPR	-

303.	Pembangunan Drainase RT.04 Desa Paul Jl. Bir Ali	P + 200M L + 100M T + 80CM	BAKARANGAN	DINAS PUPR	-
304.	Pembangunan Jembatan Desa Pematang Karang RT.02	Ukuran 4 X 5 M	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-
305.	Pemasangan sumur BOR dalam lokasi PP. Puteri Siti Khadijah RT.005 RW.002	1 PAKET	TAPIN TENGAH	DINAS PUPR	-

Sumber Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja Sekretariat DPRD tahun 2021 yang ditargetkan, telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Hanya 1 (satu) indikator yang terealisasi sesuai target yang diharapkan Berikut perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2021 :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Program dan Kegiatan	Realisasi Kinerja
Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	Seluruh Program dan Kegiatan Berdasarkan Hasil Survey IKM	87,14
	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, Fasilitasi Tugas DPRD	100%
	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	Fasilitasi Tugas DPRD	100%
	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	62,5%

	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	Pembahasan Kebijakan Anggaran, Peningkatan Kapasitas DPRD	100%
Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	Penyerapan dan Penghimpunan Masyarakat Aspirasi	73,6%
Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	Penyerapan dan Penghimpunan Masyarakat Aspirasi	100%
Rata-rata capaian dari sasaran strategis 100%				

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Analisis realisasi dan capaian kinerja Sekretariat DPRD pada LKIP Tahun 2020 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dengan Tahun 2021 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja	
		2021	
		TARGET	REALISASI
1	2	3	4
Meningkatnya pelayanan terhadap Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	87,14
	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%
	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%
	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	62,5%

	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	100%
Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	73,6%
Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019 DAN TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2018		2019		2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	5	6
Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu Persentase Raperda yang tepat waktu Persentase dukungan Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	90%	80%	90%	87%	80%	120%
		100%	100%	100%	70%	90%	100%
		100%	40%	100%	95%	80%	100%
		100%	80%	100%	100%	90%	100%

Dari tabel tersebut diatas diketahui jumlah keseluruhan sasaran tahun 2020 sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kategori masing masing realisasi kinerja sebesar kurang lebih rata-rata 80%, dan setiap tahunnya terus meningkat, pada tahun 2020 sasaran berjumlah 1 (satu) sasaran dan realisasi kinerja mengalami kenaikan yang cukup signifikan dr tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh program Sekretariat DPRD tahun 2020 telah melebihi target yang sudah ditetapkan.

Pada tahun 2021 sasaran berjumlah 3 (tiga) sasaran dengan realisasi masing2 kinerja rata-rata 100%. Hanya 1 sasaran yang tidak memenuhi target akan tetapi realisasi tidak terlalu rendah dari target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh program dan Kegiatan serta capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2021 telah memenuhi target yang sudah ditetapkan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Analisis capaian kinerja Sekretariat DPRD pada LKIP Tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) dapat dilihat pada tabel berikut :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Table 3.3

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2021	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	5	6
Meningkatnya pelayanan	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	80	87,14

terhadap Anggota DPRD	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%	100%
	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	80%	62,5%
	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	90%	100%
Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	65%	73,6%
Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan indikator kinerja utama sebanyak 7 (tujuh) IKU, realisasi target kinerja tahun 2021 telah mencapai target jangka menengah yakni melebihi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh program Sekretariat DPRD tahun 2021 telah mencapai target jangka menengah.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 hasil capaian 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang diharapkan.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelayanan kesekretariatan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin. Pada tahun 2021 hanya terdapat 2 Program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dan 14 Kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang mendukung pelayanan terhadap kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin yaitu Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Tingkat keberhasilan Kegiatan ini berhasil terakomodir dengan baik.

Manfaat dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

- Terasilitasi layanan makanan dan minuman anggota DPRD Kabupaten Tapin
- Terasilitasinya kebersihan dan keamanan Kantor DPRD Kabupaten Tapin

- Terfasilitasinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa koran dan media cetak untuk menunjang tugas Pimpinan dan Anggota DPRD
- Terjalinnnya sinergitas dan keharmonisan antara Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Tapin dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin

Adapun *kendala* yang dihadapi pada Program dan kegiatan yang terdapat dalam administrasi pelayanan perkantoran adalah sebagai berikut:

- Kurangnya SDM dan personalia yang memadai dalam melaksanakan tugas kebersihan dan keamanan
- Belum ditetapkannya penanggung jawab dan SOP (standar operasional prosedur) dalam menjalankan tugas kebersihan dan keamanan
- Jadwal Kegiatan Dewan yang kadang berubah sewaktu-waktu, kadang membuat penyediaan makanan dan minuman terkendala dan menyebabkan miss komunikasi
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung pelayanan terhadap kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Tingkat keberhasilan Kegiatan ini berhasil terakomodir dengan baik.

Manfaat dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- Terfasilitasinya perbaikan, pergantian dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan Kendaraan Dinas Jabatan untuk Pimpinan.
- Terfasilitasinya perbaikan dan pemeliharaan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Tapin Ruang kerja dan ruangan rapat Pimpinan dan Anggota DPRD
- Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa, meja kursi dll Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin

Kendala dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- Kekurangan Penganggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, kadang menjadi polemik tersendiri karena biasanya akan menuai protes khususnya dari Pimpinan.
- Waktu pengerjaan yang singkat membuat Pekerjaan Rehab tidak maksimal
- Kualitas barang tidak dijadikan standar utama dalam pengadaan barang milik daerah sehingga terdapat barang yang tidak bisa dipakai lama sudah rusak.
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung pelayanan terhadap kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. Tingkat keberhasilan Kegiatan ini berhasil terakomodir dengan baik.

Manfaat dari Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD adalah sebagai berikut:

- Terfasilitasinya Hak administratif, protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten Tapin sesuai PP Nomor 18 tahun 2017
- Tersedianya Pakaian Dinas untuk penunjang kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Kendala dari Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD adalah sebagai berikut:

- Tidak cocok hasil pekerjaan yang diharapkan oleh Pimpinan dan Anggota terhadap Pengadaan Pakain Dinas kerja
- Adanya Pandemi Internasional Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya aktivitas kegiatan, sehingga menyebabkan agenda tahunan Medical check up tahun ini mepet di akhir tahun dan ada kenaikan Tarif dari RS Propinsi pelaksanaan medical check up.
- Keinginan Anggota DPRD meminta kenaikan Penghasilan kadang juga merupakan kendala dari Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Seluruh Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pembahasan Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Tugas DPRD merupakan kegiatan yang mendukung pelayanan terhadap kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin dan mendukung pencapaian indikator kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin. Tingkat keberhasilan Program ini

berhasil terakomodir dengan baik. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan Program Inti DPRD Kabupaten Tapin.

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan Pembahasan Kerjasama Daerah

Manfaat dari Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD adalah sebagai berikut:

- Terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tapin yang mendukung Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
- Berfungsinya Legislatif sebagai pembentuk peraturan

Kendala dari Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD adalah sebagai berikut:

- Kurangnya sinkronisasi antar Komisi DPRD Kabupaten Tapin dalam pembuatan perda
 - Lemahnya penggalan materi sebagai bahan pembentukan perda
 - Kualiatas SDM Anggota DPRD berkaitan dengan bidang Hukun dan Peraturan Per-UU-an tidak merata
 - Penekanan prioritas Ranperda yang masih belum jelas dan terukur
- Pembahasan Kebijakan Anggaran

Manfaat dari Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran adalah sebagai berikut:

- Terasilitasinya Rapat-rapat Pembahasan Anggaran
- Terkoordinasi nya keinginan yang sejalan antara Eksekutif dan Legislatif
- Terasilitasinya APBD Kabupaten Tapin

Kendala dari Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran adalah sebagai berikut:

- Jadwal Kegiatan DPRD yang sewaktu-waktu sering berubah merupakan salah satu kendala yang sering terjadi.
- Terdapat ketidaksesuaian Eksekutif atas permintaan Lgislatif.

- Peningkatan Kapasitas DPRD

Manfaat dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD adalah sebagai berikut:

- Terasilitasinya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

- Tersedianya Kelompok pakar dan Tim Ahli untuk menunjang Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD
- Terlaksananya Kegiatan rapat- rapat DPRD
- Sebagai Dokumentasi Rapat dan Kodefikikasi
- Sumber informasi peserta yang tidak hadir
- Sebagai panduan agar acara berjalan dengan lancar terukur dan sistematis

Kendala dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD adalah sebagai berikut:

- Jadwal Kegiatan DPRD yang sewaktu-waktu sering berubah merupakan salah satu kendala yang sering terjadi
- Kualitas SDM Notulen Rapat yang kurang memadai
- Kurangnya Bimbingan Teknis pembuatan naskah risalah
- Keterbatasan Pemakaian Bahasa Indonesia pada saat rapat berlangsung membuat Aplikasi pembuat risalah e-risalah tidak berfungsi.
- Kurangnya personalia dan kurang aktifnya Tim Humas DPRD dalam mempublikasikan Kegiatan-kegiatan DPRD dizaman yang serba digital secara online lewat media sosial belum berfungsi maksimal
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Manfaat dari Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Terakomodir nya aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD
- Terakomodirnya Pokok-pokok Pikiran DPRD dari hasil Reses
- Sebagai sarana para konstituen memberikan aspirasi lewat Kegiatan Reses

Kendala dari Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Belum terfasilitasi secara maksimal Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD
- Kurang nya SDM yang memadai yang mengakomodir Aspirasi yang masuk
- Tidak maksimalnya kegiatan tatap muka karena pembatasan dan penerapan protocol Kesehatan pada masa pandemi Covid-19 ini.

- Kurangnya SDM masyarakat yang aktif dalam memberikan aspirasi, sehingga pertemuan menjadi kurang efektif dan efisien.
- Fasilitasi Tugas DPRD

Manfaat dari Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- Meningkatnya pengetahuan terhadap tugas dan fungsi Anggota Legislatif
- Berkontribusi membangun daerah lebih baik lagi dari hasil konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten/kota atau propinsi yang lebih maju

Kendala dari Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD adalah sebagai berikut:

- Jadwal Kegiatan DPRD yang sewaktu-waktu sering berubah merupakan salah satu kendala yang sering terjadi
- Waktu yang diberikan untuk menghubungi tempat tujuan yang akan dikunjungi kadang terbatas
- Tidak mempunyai kontak atau link tempat yang akan dituju untuk konsultasi dan study banding, sehingga kadang harus mencari lewat google dan nomor kontak yang terdaftar digoogle tidak jarang juga tidak bisa dihubungi

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Adanya Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut pada tahun 2021 membuat Perekonomian Indonesia Khususnya Kabupaten Tapin mengalami kemunduran. Segala aspek Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dll mengalami kendala yang berat. Beberapa Kegiatan terpaksa ditunda bahkan ada yang tidak bisa dilaksanakan.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD ini adalah sebesar Rp 41.427.808.602 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 32.478.044.152 atau 78,40 persen sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.949.764.450,- atau 21,60 persen. Dibanding tahun 2020 Realisasi Anggaran tercapai sebesar 85,30% tahun ini hanya sebesar 78,40%, hal ini disebabkan adanya beberapa Perubahan Regulasi Pemerintah Pusat yang berlaku pada tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan Pelayanan kesekretariatan demi terwujudnya pelayanan yang optimal ke Dewan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin.

Didalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang dihadapi diatas, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Peningkatan Sumber Daya Manusia, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu.
2. Memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan rutin .
3. Meningkatkan kualitas konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja ke luar daerah.
4. Menambah kualitas pendidikan dan latihan/bintek sehingga lebih cepat pemahaman dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membuat SOP pedoman teknis bagi Pelayanan Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra Pemerintah Daerah dimata masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dan Fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin sebagaimana Tupoksi yang diemban, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Tapin.

Analisis kinerja atas efisiensi penggunaan sumber daya dari Eselon 2 sampai Eselon 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	ESELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020
Eselon II	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD		Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80%	108%
			Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%
			Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%
			Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	78.1%
			Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	111%
			Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	113%
			Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%
			Persentase Aparatur sesuai kompetensinya	80%	80%
			Persentase Kegiatan Dewan yang Terasilitasi dalam meningkatkan dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80%	80%
			Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80%	100%
Eselon III	Meningkatkan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80%	80%
			Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	80%	80%
			Meningkatkan Keterseediaan dan Fasilitasi	80%	78%

Bab III

	Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda			
	Meningkatkan Anggota DPRD	partisipasi	Presentase rapat-rapat dewan yang memenuhi korum	80%
Eselon III	Meningkatkan Penganggaran dan Pengawasan Anggota DPRD	Fasilitasi	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80%
	Tertindakannya kegiatan reses Anggota DPRD	reses	Jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 Kali
	Meningkatkan Anggota DPRD	partisipasi	Presentase rapat-rapat Anggaran dan Pengawasan dewan yang memenuhi korum	80%
Eselon IV	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian		Tersedianya data dan administrasi kepegawaian	12 Bulan
	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran		Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	12 Bulan
Eselon IV	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase laporan administrasi keuangan, semesteran, Akhir tahun dan lain-lain yang tersedia	100%
	Tertindakannya Fasilitasi Rapat dan Persidangan sesuai jadwal		Tertindakannya Penyusunan Program Kerja DPRD	12 Bulan
Eselon IV	Tersedianya Informasi Kegiatan DPRD		Pelayanan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	12 Bulan
			Tertindakannya Kegiatan Rapat Dengar Pendapat	12 Bulan
			Tertindakannya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Paket
Eselon IV	Tertindakannya kegiatan fasilitasi Rapat-rapat Penganggaran		Tertindakannya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Paket
			Tertindakannya rapat-rapat pembahasan anggaran dan pertanggung jawaban APBD	1 Paket

Bab III

	DPRD dan pertanggung jawaban DPRD				
Eselon IV	Terselenggaranya Kegiatan pengawasan yang terlaksana	Fasilitasi yang	Terselenggaranya Kunjungan Kerja dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan
			Membandingkan dan menyelaraskan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan RPJMD	100%	65.60%

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD ini didukung dengan adanya program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Keberhasilan yang dicapai didukung oleh anggaran keuangan yang diajukan telah sesuai dengan rencana pelaksanaan dan telah terakomodasi pembiayaannya serta Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD, DPRD, dan OPD di Kabupaten Tapin untuk saling mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, dengan 7 kegiatan yaitu :

1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
2. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
3. Pembahasan Kebijakan Anggaran
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pembahasan Kerja Sama Daerah
7. Fasilitasi Tugas DPRD

Dalam hal optimalisasi Pelayanan kepada DPRD Kabupaten Tapin, setiap tahun Sekretariat DPRD berupaya memaksimalkan fungsi dan tugas DPRD. Termasuk perencanaan Program dan Kegiatan untuk menunjang Visi dan Misi SKPD.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastakaan dan kearsipan DPRD.
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompetensi SDM penyelenggaraan urusan rumah tangga dan kehumasan serta keprotokolan.
4. Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin melaksanakan 7 program dengan 43 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41.427.808.602,-. Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 16.925.978.399,- atau 69,9%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target karena terkendala waktu pelaksanaan juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran, adanya pandemi Covid-19 selain itu faktor lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada RPJMPD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan **Sangat Baik**, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini dibuktikan bahwa realisasi dari 7 indikator kinerja sesuai target. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Kegiatan 2021	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26,993,834,402	23,251,072,309	86.13
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89,400,000	81,632,400	91.31
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89,400,000	81,632,400	91.31
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,071,107,118	2,792,230,007	90.92
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,938,207,118	2,662,915,107	90.63

	4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	103,800,000	103,537,500	99.75
	4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	2,936,400	97.88
	4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26,100,000	22,841,000	87.51
	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,667,995,900	2,977,059,692	63.78
	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,770,800	15,770,000	99.99
	4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,177,700	49,883,500	92.07
	4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174,326,500	153,751,500	88.20
	4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93,112,400	92,083,700	98.90
	4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	122,400,000	122,400,000	100.00
	4.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	17,615,500	0	0.00
	4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	78,650,000	64,007,000	81.38
	4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,111,943,000	2,479,163,992	60.29
	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,645,120,409	2,599,780,300	98.29
	4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,577,428,900	1,536,164,500	97.38
	4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,067,691,509	1,063,615,800	99.62
	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404,192,000	313,485,543	77.56
	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,092,000	10,000,000	99.09
	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192,000,000	105,485,543	54.94
	4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202,100,000	198,000,000	97.97
	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,449,126,275	1,335,191,221	92.14
	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175,885,700	147,465,699	83.84
	4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166,667,300	135,554,822	81.33

	4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56,015,000	8,840,000	15.78
	4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,050,558,275	1,043,330,700	99.31
	4.02.01.2.13 Penataan Organisasi	105,600,000	48,570,000	45.99
	4.02.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	105,600,000	48,570,000	45.99
	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14,561,292,700	13,103,123,146	89.99
	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14,201,657,200	12,811,865,646	90.21
	4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	284,635,500	242,687,500	85.26
	4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75,000,000	48,570,000	64.76
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14,433,974,200	9,226,971,843	63.93
	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	555,459,600	208,573,700	37.55
	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	21,825,700	0	0.00
	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	319,999,800	132,573,700	41.43
	4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	213,634,100	76,000,000	35.57
	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	160,374,000	129,215,800	80.57
	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	27,949,800	18,143,200	64.91
	4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21,074,800	20,893,200	99.14
	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	27,949,800	27,768,200	99.35
	4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	27,949,800	20,893,200	74.75
	4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	0	0	0.00
	4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	55,449,800	41,518,000	74.87
	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	886,366,300	681,414,000	76.88
	4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	107,752,600	106,014,000	98.39
	4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	406,500,000	210,000,000	51.66
	4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	372,113,700	365,400,000	98.20
	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	343,706,400	284,549,500	82.79
	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	19,500,000	3,525,000	18.08

	4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3,836,400	0	0.00
	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	320,370,000	281,024,500	87.72
	4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	12,739,900	0	0.00
	4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	12,739,900	0	0.00
	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	12,475,328,000	7,923,218,843	63.51
	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9,866,855,000	7,158,887,496	72.55
	4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2,608,473,000	764,331,347	29.30
	Total	41,427,808,602	32,478,044,152	78.40

BAB

IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) disusun dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin menyusun LKJIP tahun 2021 sebagai cerminan dari hasil kinerja Sekretariat DPRD selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin tahun 2021, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2021.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemukan berbagai kendala baik faktor internal maupun eksternal dan telah diupayakan untuk mengatasi kelemahan (*Weaknesses*) dengan mengoptimalkan kekuatan (*Strengths*) yang ada, sehingga dapat meminimalkan kendala yang dihadapi agar tugas organisasi bisa tercapai dengan baik.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan terhadap Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	87,14	108%

	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%	100%
	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	62,5%	78,1%
	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	100%	111%
Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	73,6%	113%
Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari 7 indikator, sebanyak 6 indikator mencapai hasil 100%, hanya 1 indikator yang tidak tercapai 100% yaitu hanya 78%. Akan tetapi dari seluruh hasil capaian indikator Sekretariat DPRD mencapai rata-rata 108%. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan **Sangat Baik**, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100% yakni hanya mencapai 78,40%. Namun realisasi kinerja Sekretariat DPRD dari 7 indikator kinerja yang ditargetkan semua mencapai target yang diharapkan, hanya 1 indikator yang tidak tercapai tetapi realisasinya tidak terlalu jauh dari target.

Pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun penyelenggaraan tugas secara struktural sebagian besar dapat berjalan dengan lancar, di samping evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat disinergikan dengan langkah-langkah kegiatan yang akan datang. Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan Visi dan Misi organisasi.

Dari kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021 diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan ditahun 2022 sehingga dihasilkan kegiatan yang mengacu pada sasaran dan program yang bersifat transparan dan akuntabel.

Semoga LKJIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Sekretariat DPRD pada tahun-tahun berikutnya.

Rantau, Februari 2022
SEKRETARIS DPRD,

H. NOOR IFANSYAH, SKM, MS
NIP. 19660723 198903 1 012